

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara terluas didunia. Soeharto bertahan menjadi presiden selama 32 tahun tentu sangat hebat. Mengingat populasi masyarakat Indonesia yang terdiri atas berbagai macam kelompok dan golongan, baik suku, agama dan politik. Faktor penting Soeharto bertahan dikursi kepresidenan karena kebijakannya menjinakkan Islam politik.¹

Pemerintah Orde Baru dibawah presiden Soeharto mempunyai tekad untuk melaksanakan pembangunan ekonomi. Untuk mendukung langkah tersebut upaya yang dilakukan adalah dengan meredam berbagai konflik, sehingga sistem politik mrnjadi stabil. Dengan alasan demi kestabilan politik inilah, maka pemerintahan berupaya secara sistematis menekan berbagai pertentangan politik dan ideologi yang dianggap sebagai sumber pemicu konflik. Format politik kemudian diatur sedemikian rupa, sehingga partai-partai yang ada selama ini dilakukan peleburan menjadi tiga partai saja.²

Pengertian kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau

¹Laode Ida, *Anatomi Konflik NU, Elit Islam dan Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar harapan. 1996. Hlm. 206.

²Suyitno. *Matahari Terbit Bintang Sembilan*. Jakarta: Gama Media. 2012. Hlm 83

sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu.³Kebijakan berasal dari kata “*policy*” yang artinya sebuah rencana kegiatan atau pernyataan mengenai tujuan-tujuan yang diajukan atau diadopsi oleh suatu pemerintahan, partai politik, dan lain-lain. Kebijakan juga diartikan sebagai pernyataan-pernyataan mengenai kontrak penjaminan dan pernyataan tertulis⁴.

Politik adalah kemahiran menghimpun kekuatan, meningkatkan kuantitas dan kualitas kekuatan, mengawasi dan menggunakan kekuatan untuk mencapai tujuan tertentu didalam negara atau institut lainnya.⁵Sejak awal, hingga perkembangan terakhir ada sekurang-kurangnya lima pandangan politik. *Pertama*, politik adalah usaha-usaha yang ditempuh warga Negara untuk membicarakan dan mewujudkan kebaikan bersama.*Kedua*, politik ialah segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan.*Ketiga*, politik ialah sebagai segala kegiatan yang diarahkan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dan masyarakat.*Keempat*, politik sebagai kegiatan yang berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum.*Kelima*, politik sebagai konflik dalam rangka mencari dan mempertahankan sumber-sumber yang sangat penting.⁶Salah satu realisasi pembaharuan politik adalah “restrukturisasi partai-partai politik” yaitu upaya penataan kembali secara sistematis partai-partai politik dari segi struktur dan ideologinya. Struktur yang dimaksud adalah penyederhanaan jumlah partai politik, sedangkan dalam hal ideologi adalah

³James E. Anderson. *Public policy Making*, New York: Holt, Rinehart and Winston. 1984. 3.

⁴AS. Hornby, *oxford advanced Learner's dictionary of Current English*, (Oxford: Oxford University press). 1995. Hlm.893.

⁵Ayi Sofyan, *Etika Politik Islam*, Bandung: Putaka Setia, 2012. Hlm. 21.

⁶*Ibid*, hlm 29

pembaharuan orientasi dari “aliran partai” menjadi orientasi pembangunan (ekonomi).⁷

Karena kegagalan Demokrasi Terpimpin yang ternyata telah membawa kemunduran diberbagai segi kehidupan, Presiden Soeharto membawa semangat baru (Orde Baru) hendak mengoreksi pemerintahan Soekarno dengan tekad melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 45) secara murni dan konsekuen.⁸ Mempertahankan, memurnikan wujud dan memurnikan pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 itulah fungsi dan tujuan Orde Baru. Setiap insan Indonesia, setiap organisasi, setiap bentuk usaha apapun yang menamakan dirinya Orde Baru harus menerima dua landasan pokok Pancasila dan UUD 1945, tidak saja menerima tetapi harus mengamalkan dan memberi isi pada Pancasila dan UUD 1945 sebenar-benarnya, setepat-tepatnya, semurni-murninya sesuai dengan jiwa dan semangatnya. Dengan demikian, Orde Baru adalah tatanan seluruh peri kehidupan rakyat, bangsa dan negara yang diletakkan kembali kepada pelaksanaan kemurnian pancasila dan UUD 1945.⁹

Gagalnya pemberontakan G-30S/PKI dan jatuhnya kekuasaan Soekarno menandai bangkitnya sebuah era baru yang oleh pendukungnya disebut Orde Baru. Kelahirannya ditandai oleh pemberian mandat yang dikenal dengan Surat Perintah Sebelas Maret 1966 atau Supersemar oleh Soekarno kepada Soeharto untuk mengatasi situasi yang diakibatkan oleh timbulnya pemberontakan

⁷Valina singka Subekti, *partai Syarikat Islam Indonesia*, Jakarta: Pustaka Obor Indonesia. 2014., hlm 5

⁸Hamdan Zoelva. *Penakzulan Presiden di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika. 2011, hlm 78

⁹David Bouchier, *Pemikiran Sosial dan Politik Indonesia (1965-1999)*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. 2006, hlm 50.

kaumkomunis tersebut. Soeharto dengan ABRI dan bantuan umat Islam akhirnya berhasil menguasai keadaan. Pada awalnya, Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto memberikan sebersit harapan dikalangan masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam. Bangsa Indonesia ingin menapaki kembali kehidupan bernegara yang normal, etis, dan Demokratis. Apalagi Orde Baru sendiri menggunakan slogan “Ingin melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen”. Buat umat Islam, khususnya para tokoh bekas Masyumi, kehadiran Orde Baru diharapkan menjadi “Lampu Hijau” bagi tampilnya kembali kekuatan Islam politik. Hal ini ditambah pula dengan kebijakan Orde Baru yang membebaskan para tokoh Masyumi yang sebelumnya dijebloskan Soekarno kepenjara. Maka sejalan dengan perkembangan Orde Baru umat Islam menyusun rencana bagi tampilnya Islam politik untuk memperjuangkan aspirasi syariat Islam masuk kedalam sistem kenegaraan Indonesia.¹⁰

Kelahiran Orde Baru tidak terlepas dari peran kunci NU. Sejak awal ormas tersebut terlihat aktif bahu membahu dengan ABRI dalam menumpas PKI. Sehari setelah meletusnya G30S/PKI. GP. Ansor merupakan organisasi pertama yang memberikan kecaman keras terhadap tindakan tersebut. Tidak hanya itu, Ansor bahkan terlibat aktif bersama militer melakukan penangkapan terhadap PKI.¹¹

Namun akhirnya mereka menelan kekecewaan. Pemerintahan Orde Baru yang didukung sepenuhnya oleh militer tidak tersedia merehabilitasi Masyumi

¹⁰Muhammad Iqbal. *Pemikiran politik Islam*. Jakarta: Kenana Prenada Media Group. 2010. 275.

¹¹Suyitno, *Matahari Terbit Bintang Sembilan*, Hlm. 241

dan tidak mengizinkan para eksponennya untuk terlibat dalam politik praktis, Masyumi adalah partai modern yang mampu memainkan peranannya dalam proses demokrasi dan pelajaran berdemokrasi di Indonesia. Pengalaman tokoh-tokoh Masyumi dalam politik praktis selama masa demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin tentu modal khusus bagi mereka. Selain upaya ingin menghidupkan kembali Masyumi oleh para eksponennya. Pemerintah Orde Baru mempunyai sikap ambivalen terhadap umat Islam. Di satu pihak pemerintah merasa berhutang budi kepada kaum Muslimin karena partisipasi mereka dalam perjuangan melawan komunis, tetapi dipihak lain mereka menentang munculnya komunitas-komunitas yang kuat secara politik¹²

Segera sesudah Soeharto mengukuhkan kekuasaannya dan berhasil melengserkan Soekarno pada 1966, Ia menjanjikan pemilihan umum pada tahun 1967. Namun, dengan beberapa alasan, pemilihan umum itu baru dapat dilaksanakan pada tahun 1971, pemilu kedua sejak Indonesia merdeka. Pemilu tahun 1971 ini, rezim Soeharto tidak banyak memberi tempat kepada sebagian partai atau politisi yang telah mendapat kedudukan penting pada masa rezim Soekarno. Baik Presiden Soekarno maupun Presiden Soeharto memandang partai-partai politik yang berlandaskan Islam sebagai pesaing kekuasaan yang potensial, yang dapat merobohkan landasan negara nasionalis. Atas dasar ini, sepanjang

¹²Haris, Syamsudin. *Pemilu-pemilu Orde Baru*. Jakarta: Gramedia. 1997. Hlm 24.

lebih dari empat dekade, kedua pemerintahan tersebut berupaya melemahkan dan “menjinakan” partai-partai Islam.¹³

Islam sebagai agama komunitas terbesar dinegara ini tidak mungkin diabaikan, pada masa Orde Baru, Islam idieologis tidak diperkenankan tampil dalam perpolitikan nasional.Saat itu Islam hanya dilihat sebagai agama individu yang tidakpunya kaitan dengan kehidupan politik.Pemerintahan Orde Baru menganggap partai-partai politik telah ikut berperan dalam memunculkan kekacauan, yang puncaknya terjadi pada peristiwa 30 September 1965. Karenanya, pemerintah Orde Baru lebih condong kepada konfederasi golongan-golongan karya yang disebut Sekretariat Bersama Golongan Karya. Sekretariat bersama GOLKAR tersebut sudah dibentuk pada 1964, yang semula untuk menggabungkan organisasi-organisasi anti-komunis. Pada tahun 1971, GOLKAR ikut dalam pemilihan umum, walaupun dinyatakan sebagai bukan partai politik.Kecurigaan pemerintah terhadap partai politik sebagai biang kekacauan pada masa Orde Lama, menjadikanusulan umat Islam untuk merehabilitasi Masyumi yang kritis itu ke arena politik. ¹⁴

Pemerintah mendesak agar keempat partai politik Islam yang ada menghapuskan sebutan Islam dan meleburkan diri dalam satu wadah yang di sebut Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Partai-partai politik non-Islam (Nasionalis, Protestan dan Khatolik) meleburkan diri menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Pada 13 Juni 1975 telah disampaikan rancangan undang-undang

¹³Bahtiar, Effendy, *Islam dan Negara: Tranfarmasi Pemikiran dan Praktik politik Islam di Indonesia*, Jakarta: Paramadina,1998.Hlm 1-2.

¹⁴*Ibid*, hlm .8

partai politik dan golongan karya oleh pemerintah kepada parlemen, dan disetujui pada 14 Agustus tahun itu juga. Tujuannya, agar pada pemilihan umum berikutnya yang dijadwalkan berlangsung pada 1977, hanya akan ada tiga kontestan: GOLKAR (Partai Pemerintah), PPP (gabungan partai Islam), dan PDI (peleburan dari partai-partai nasionalis sekuler dan non-Islam).¹⁵

Sepanjang periode ini Soeharto memberikan pengawasan ketat terhadap pergerakan dan partai politik Muslim. Pihak militer yang diberi hak istimewa dalam bidang kekuasaan menentang rehabilitasi Masyumi karena keterlibatannya dengan PRRI tahun 1958, juga menentang penerapan kembali Piagam Jakarta 1945, serta menentang tuntutan memberlakukan hukum Islam untuk mengendalikan negara. Oleh karena itu, Soeharto kemudian mengizinkan pembentukan PARMUSI dengan syarat seluruh mantan pimpinan Masyumi tidak dilibatkan dalam pimpinan eksekutif partai tersebut. Pada tahun 1969 Soeharto membentuk Lembaga Pusat Dakwah Islam Indonesia (LDII) untuk memberi wadah kegiatan dan guna menekan kelompok militan dan reformis Islam.¹⁶

Dalam perkembangan berikutnya, pada tahun 1973 pemerintahan Soeharto akhirnya mengambil kebijakan penyederhanaan partai. Menurut Syarbini kebijakan politik merupakan serangkaian tindakan yang menjadi keputusan pemerintah yang menyangkut soal kekuasaan.¹⁷ Di mata banyak perwira Angkatan Darat, sistem banyak partai merupakan faktor penghambat tercapainya konsensus

¹⁵Nor Huda. *Islam Nusantara: Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indonesia*, Yogyakarta: ar-Ruzz Media. 2013. Hlm. 135.

¹⁶ Musyrifah Sunanto, *Sejarah Peradaban Islam Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2012. Hlm 84.

¹⁷Syarbini, *Sosiologi dan Politik*, Bogor: Ghalia Indonesia: 2002. Hlm. 14.

nasional tentang dasar serta tujuan negara. Partai-partai hanya melakukan oposisi demi kepentingan dan kurang memperhatikan program-program pembangunan. Partai-partai berbasis Islam bergabung kedalam partai persatuan pembangunan (PPP), sedangkan partai yang berbasis nasionalis dan Kristen bergabung kedalam partai Demokrasi Indonesia (PDI). Menurut Anderson Kebijakan Politik adalah sebagai serangkaian yang mempunyai tujuan memperoleh kekuasaan, usaha mempertahankan kekuasaan dan menggunakan kekuasaan.¹⁸

Menurut Din Syamsudin, ada tiga implikasi dari kebijakan penyederhanaan partai ini. *Pertama* penyederhanaan ini melahirkan dikotomi antara politik Islam dan politik non Islam. PPP yang merepresentasikan politik Islam berhadapan dengan GOLKAR dan PDI yang mewakili politik non Islam. *Kedua* penyederhanaan ini jelas memecah belah parpol. Dengan unsur-unsur yang berbeda dengan kepentingan dan latar belakang, partai Islam yang berfusi dalam PPP tidak pernah bersatu dalam arti yang sesungguhnya. Perpecahan dan konflik internal senantiasa mewarnai perjalanan partai Islam ini. *Ketiga* penyederhanaan ini juga berarti domestikasi politik Islam.

Dengan kebijakan ini PPP harus menyesuaikan tari dan irama gendang pemerintah. Salah satu yang terberat adalah penyesuaian PPP terhadap kebijakan pemerintah yang memberlakukan asas tunggal Pancasila bagi parpol dan organisasi masyarakat.¹⁹ Pada masa pertama umat Islam mengalami perlakuan

¹⁸Bachtian Effend, , *Islam dan Negara, Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, Hlm. 6

¹⁹Valina singka Subekti, *Partai Syarikat Islam Indonesia*, Jakarta: Pustaka Obor Indonesia. hlm. 6-7

yang tidak bersahabat dari Orde Baru. Hubungan Orde Baru dan Islam pada periode awal ini sering ditandai konfrontasi yang jelas-jelas merugikan Islam. Pada fase yang berlangsung antara 1966-1981 ini Orde Baru bertindak refrensif terhadap umat Islam diantaranya penolakan rehabilitasi Masyumi, penolakan berdirinya partai Demokrasi Islam Indonesia (PDII) yang diprakarsai Bung Hatta, rumusan rancangan undang-undang tentang perkawinan, upaya memasukan aliran kepercayaan kedalam agama, menggantikan pelajaran agama dengan Pancasila kedalam kurikulum pendidikan nasional, larangan berjilbab bagi siswi muslimah disekolah umum dan legalisasi perjudian oleh negara, seperti dalam TSSB, KSOB dan PORKAS.²⁰

Selain dari mempersempit ruang gerak Islam melalui partai politik, Soeharto melalui strateginya untuk mempertahankan kekuasaannya dengan cara “menjinakkan” NU (Nahdatul Ulama) yang notabene sebagai organisasi sosial kemasyarakatan yang mempunyai masa yang kuat dan dekat dengan masyarakat. Menghadapi berbagai kebijakan ini. Umat Islam menjadikan oposisi dan selalu berada dipihak yang dikalahkan. Dalam periode antagonis yang berakhir hingga tahun 1985 ini, terdapat dua babakan sikap umat Islam terhadap kebijakan Orde Baru. Pada masa awal hingga 1981 kelihatannya umat Islam mempunyai suara yang bulat menentang berbagai kebijakan Orde Baru yang dipandang bertentangan dengan Islam. Sementara dalam masa 1982-1985 umat Islam mulai bersibak jalan merespons kebijakan politik Orde Baru. Sebagian tetap mempertahankan sikap oposisi dan akomodif terhadap Orde Baru. Sikap ini

²⁰*Ibid. Hlm 8*

dikarenakan oleh mulai banyaknya kaum cendekiawan dan kelas menengah Islam yang masuk ke jajaran pemerintahan. Sebaliknya, Orde Baru sendiri pada periode kedua tersebut kelihatannya memandang Islam sebagai kekuatan riil masyarakat Indonesia yang tidak bisa dinafikan, sehingga lebih berhati-hati dalam menentukan kebijakan yang berhubungan dengan kepentingan umat Islam.²¹

Fenomena yang terjadi pada Politik Orde Baru adalah ketika Soeharto diawal karir politiknya Ia merangkul umat Islam untuk bersama-sama membentuk pemerintahan yang baru untuk mewujudkan negara yang berdemokrasi. Akan tetapi pada akhirnya setelah Soeharto menjadai Presiden dan memandang Politik Islam sebagai penghalang untuk mewujudkan Demokrasi yang berasaskan Pancasila. Oleh karena itu, Soeharto mempersempit ruang gerak politik Islam dan melebur partai-partai Islam menjadi satu wadah serta dilarangnya umat Islam untuk mendirikan organisasi-organisasi Islam.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Sebagaimana yang telah di uraikan sebelumnya bahwa penelitian ini akan menjelaskan kebijakan politik orde baru terhadap politik Islam di Indonesia, maka perlu dilakukan pembatasan masalah :

- 1) keadaan politik di Indonesia menjelang munculnya Orde Baru
- 2) Kebijakan Politik Orde Baru terhadap Partai politik Islam

²¹Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution , *Pemikiran Politik Islam* (Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontenporer), Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, 2010. Hlm.279.

2. Rumusan Masalah

Rsumusan masalah pada penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana Landasan Historis Orde Baru Dalam Politik Islam di Indonesia?
- 2) Bagaimana kebijakan politik Orde Baru terhadap Partai politik Islam?
- 3) Apa dampak kebijakan politik Orde Baru terhadap Politik Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan:

- 1) Untuk menganalisis bagaimana Landasan Historis Orde Baru Dalam Politik Islam di Indonesia
- 2) Untuk menganalisis dampak kebijakan politik Orde Baru.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini terdiri dari dua bentuk yaitu:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi berupa tambahan wawasan keilmuan kepada mahasiswa dan mahasiswi terutama Program Studi Sejarah Kebudayaan Islam, yaitu mengenai Kebijakan Politik Orde Baru Terhadap Politik Islam di Indonesia tahun 1966-1990.
- 2) Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan:
 - a) dapat dijadikan acuan bahan rujukan bagi penelitian lain yaitu mengenai Kebijakan Politik Orde Baru terhadap Politik Islam di Indonesia tahun 1966-1990
 - b) penelitian ini dapat dijadikan acuan pedoman penelitian bagi mahasiswa Pasca Sarjana Program Studi Sejarah Kebudayaan Islam. Mengenai Kebijakan Politik Orde Baru terhadap Politik Islam di Indonesia tahun 1966-1990.

E. Tinjauan Pustaka

Sejauh ini pendahuluan yang telah dilakukan, belum ada penulis yang secara khusus membahas kajian Penelitian tentang “ Kebijakan Politik Orde Baru terhadap Politik Islam di Indonesia Tahun 1966-1990” beberapa penelitian tentang politik Orde Baru, antara lain:

Tesis yang berjudul *Elit Politik dan Konsolidasi Demokrasi* (Studi tentang sirkulasi Kekuasaan Tiga Rezim Pasca-Soeharto) yang disusun oleh Luluk Nur Hamidah²² menjelaskan Pasca Soeharto pemerintahan Indonesia dikuasai oleh elit politik (B.J. Habibe, Abdurahman Wahid, dan Megawati Soekarno Putri) yang sangat kuat dan sangat prodaks. Di satu sisi mereka berperan sebagai penguasa untuk mempertahankan rezim, namun pada sisi yang lain ia pun berperan sebagai penentang untuk menjatuhkan rezim.

Tesis yang berjudul *Implementasi Kekuasaan Pemerintahan Oleh Presiden Sesudah Perubahan UUD 1945* yang disusun oleh Jasim Ilyas²³, menjelaskan tentang Kekuasaan Pemerintahan yang ada pada presiden, atau biasa disebut dengan eksekutif, merupakan konsekuensi dianutnya sistem pemerintahan presidensil oleh UUD 1945.

²²Luluk Nur Hamidah. *Elit Politik dan Konsolidasi Demokrasi* (Studi tentang sirkulasi Kekuasaan Tiga Rezim Pasca-Soeharto).Jakarta. 2006.

²³Jasim Ilyas. *Implementasi Kekuasaan Pemerintahan Oleh Presiden Sesudah Perubahan UUD 1945*. Jakarta. 2009.

Tesis yang berjudul *Sistem Pemerintahan Daerah Masa Orde Baru dan Masa Reformasi* yang disusun oleh Robert Sarlout²⁴, menjelaskan tentang Amandemen, pasal 18 UUD 1945 berbunyi”Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Setelah mengalami amandemen kedua yang disahkan MPR pada tanggal 18 Agustus 2000.

Pada buku yang berjudul “*Jejak langkah Pak Harto 28 Maret 1968-23 maret 1973*” yang ditulis oleh Team dokumentasi Presiden RI (1991)²⁵, menjelaskan bagaimana perjalanan Soeharto sejak menjadi Presiden sampai dengan pemilihan umum pertamakalinya pada masa pemerintahan Soeharto. Pada buku ini mendalami bagaimana langkah-langkah Soeharto untuk menentukan sistem pemilu dan jumlah partai yang ikut dalam pemilihan umum.²⁶ Sedangkan yang membahas secara detail tentang kebijakan Soeharto 1966-1990 belum ada.

Buku yang ditulis oleh Jusuf Wanandi (2014) yang berjudul “ *Menyibak Tabir Orde Baru (Memoar Politik Indonesia 1965-1998*²⁷), dalam buku tersebut

²⁴Robert Sarlout.*Pemerintahan Daerah Masa Orde Baru dan Masa Reformasi*. Medan. (tanpa nama penerbit),2010.

²⁵Team Dokumentasi Presiden RI, *Jejak langkah Pak Harto 28 maret 1968-23 Maret 1973*,Pakarta: PT Citra Lamtoro Agung Persada, 1991

²⁶Team Dokumentasi Presiden RI, *Jejak langkah Pak Harto 28 maret 1968-23 Maret 1973*,Pakarta: PT Citra Lamtoro Agung Persada, 1991.hlm. 7.

²⁷Wanandi,Jusuf.*Menyibak Tabir Orde Baru (memoir Politik Indonesia1965-1998)*, Jakarta: Kompas, 2014.

diceritakan peristiwa-peristiwa politik di Indonesia dimulai dari peristiwa Gerakan 30 September, Supersemar sampai dengan jatuhnya Rezin Orde Baru tahun 1998.

Buku yang ditulis oleh Ramadhan K.H (1989) yang berjudul “ *Soeharto Pikiran, Ucapan dan Tindakan*²⁸” buku tersebut mengungkap bagaimana tindakan-tindakan dan pola pikir Soeharto dalam memimpin Bangsa. Buku ini mendalami sistem perekonomian yang dijalankan oleh Soeharto untuk kemaslahatan rakyat.

Buku yang ditulis oleh Abdul Azis Thaba (1996) yang berjudul “*Islam dan Negara (dalam Politik Orde Baru)*²⁹” dalam buku tersebut diceritakan bagaimana langkah-langkah soeharto dalam mempertahankan kekuasaan, dan bagaimana hubungan pemerintah dengan umat Islam.

Sebagai kajian terdahulu bahwa Kebijakan Politik Soeharto sudah pernah dilakukan oleh Dedek Sulaiman (2008) yang berjudul *Deideologi Politik Islam (Kebijakan Pemerintah Orde Baru dalam Pemberlakuan Asas Tunggal)*³⁰, didalam Tesis tersebut diceritakan bagaimana Soeharto memberikan kebijakan politiknya untuk mencapai-cita-cita guna menciptakan suasana politik tanpa konflik dan mempunyai satu ideologi yaitu ideologi Pancasila. Yang menjadi pembeda antara Tesis yang ditulis oleh (Dedek) dengan Tesis yang diteliti adalah; peneliti melakukan penulisan khusus terhadap Pemerintahan Soeharto dan Politik Islam, sehingga terfokus pada Kebijakan Soeharto kepada Islam Politik.

²⁹Azis Thaba, Abdul. *Islam dan Negara (dalam politik Orde Baru)*, Jakarta: Gema Insani Press. 1996.

³⁰Dedek. *Deideologi Politik Islam (Kebijakan Pemerintah Orde Baru dalam Pemberlakuan Asas Tunggal)*. Semarang. 2007.

Dengan demikian dapat disimpulkan sudah ada penelitian yang membahas bagaimana hubungan Orde Baru dengan Islam di Indonesia. Namun belum ada yang meneliti mengenai kebijakan politik Orde Baru terhadap politik Islam di Indonesia pada periode tahun 1966-1990.

F. Kerangka Teori

Adapun teori yang digunakan sebagai alat ukur untuk mencari jawaban dari permasalahan tersebut. Untuk itulah, penulis menggunakan dua teori dalam penelitian ini, yaitu teori Sejarah Politik dan teori Persaingan .

Teori *pertama*, Teori Sejarah Politik menurut Brenden, O'Leary³¹ dibagi menjadi dua yaitu, *Pertama High Politic* (Politik tinggi), yaitu yang mempelajari perilaku politik para pembuat keputusan elit, maka percaya bahwa kepribadian dan mekanisme para elit politik adalah kunci pembuat sejarah. Mereka juga percaya bahwa perluasan kekuasaan dan kepentingan diri menjelaskan perilaku sebagian besar kaum politik. *Kedua; Low Politics* (politik bawah), atau politik dari bawah mereka percaya bahwa perilaku politik massa memberikan kunci untuk menjelaskan episode-episode politik utama seperti halnya beberapa revolusi yang terjadi. Selain itu bagi mereka kharisma, plot maupun blunder para pemimpin kurang begitu penting dibanding dengan perubahan nilai-nilai kepentingan dan tindakan kolektif.

Teori *kedua* yang digunakan penulis adalah Teori persaingan atau teori konflik adalah percekocokan perselisihan dan pertentangan antar anggota atau

³¹Brenden O'Leary, *Ilmu Politik, ed. Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial*, diterjemahkan Haris Munandar dkk. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hlm. 790.

masyarakat yang bersifat menyeluruh dikehidupan, dengan proses pencapaian tujuan dengan cara melemahkan pihak lain, tanpa memperhatikan norma dan nilai-nilai yang berlaku.³²

G. Definisi Konseptual

Menurut Moh Nazir.³³ Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut. Berdasarkan judul peneliti” Kebijakan politik Orde Baru terhadap Politik Islam di Indonesia 1966-1990” maka variabelnya meliputi Kebijakan Politik, dan Politik Islam.

Kebijakan. Kebijakan berasal dari kata *policy* yang artinya sebuah rencana kegiatan atau pernyataan mengenai tujuan-tujuan, yang diajukan atau diadopsi oleh suatu pemerintahan, paratai politik, dan lain-lain. Kebijakan juga diartikan sebagai pernyataan-pernyataan mengenai kontrak penjaminan atau pernyataan tertulis.³⁴ Pengertian ini mengandung arti bahwa yang disebut dengan kebijakan adalah mengenai suatu rencana, pernyataan tujuan, kontrak penjaminan dan pernyataan yang tertulis yang dikeluarkan oleh pemerintah, partai politik, dan lain-lain.

Selanjutnya Politik, berasal dari bahasa Yunani ”*Polis*” yang berarti negara atau kota dan ” *teta*” yang berarti urusan. Dalam kamus Bahasa

³²George Ritzer, *Teori Sosiologi Modern (Edisi Ketujuh)*, Jakarta: Kencana Prenada Medi Group , 2014, hlm 87.

³³Moh. Nazir, *Metode Penelitian sejarah*, Bogor: Ghalia Indonesia. 2005.126

³⁴AS. Hornby, *Oxford Advanced Learner’s dictionary of Current English*, (Oxford: Oxford University press). 1995. Hlm.893.

Persia, mempunyai pengertian “*siyasat*” berarti: Kekuasaan atas rakyat; pengelolaan urusan Negara; penyelenggaraan pemerintahan; penerapan kepemimpinan; kekuasaan; kepemimpinan; pengaturan urusan publik sesuai kepentingan mereka; penegakan keadilan; keberhukuman, ganjaran dan saksi, penjagaan teritori; penjagaan dan pengawalan; perintah dan larangan; pengelolaan urusan dalam dan luar negeri.³⁵ politik merupakan hal-hal yang berkenaan dengan tata Negara atau urusan yang mencakup siasat dalam pemerintahan Negara.³⁶

Politik adalah suatu segi khusus masyarakat yang menyangkut soal kekuasaan. Tumpuan kajiannya terhadap daya upaya memperoleh kekuasaan, usaha mempertahankan kekuasaan, penggunaan kekuasaan, dan juga bagaimana menghambat penggunaan kekuasaan. Politik juga mencakup aspek negara, kekuasaan dan kelakuakn politik.³⁷

Islam yang berasal dari kata *aslama, yuslimu, Islam*, yang memiliki beberapa arti³⁸, yaitu:

1. Melepaskan diri dari segala penyakit lahir dan batin
2. Berserah diri, menundukkan diri, atau taat sepenuh hati dan
3. Masuk ke dalam *salam* yakni selamat sejahtera, damai, hubungan yang harmonis, atau keadaan tanpa noda dan cela.

³⁵Ali Asgar Nusrati, *Sistem politik Islam (sebuah pengantar)*. Jakarta: Nur-al Huda, 2015. Hlm.23.

³⁶Delier Noer, *Bunga Rampai Dari Negeri Kanguru Kumpulan Karangan* Hlm 200.

³⁷Syahrial, Syarbini.dkk. *Sosiologi dan Politik*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2002.13.

³⁸Ali Asgar Nusrati. *Sistem politik Islam* , Hlm. 6

Jadi intisari Islam adalah berserah diri atau taat sepenuh hati kepada kehendak Allah SWT demi tercapainya kepribadian yang bersih dari cacat dan noda, hubungan yang harmonis dan damai sesama manusia, atau selamat-sejahtera dunia dan akhirat.³⁹

Dari penjelasan di atas disimpulkan kebijakan politik Orde Baru terhadap politik Islam adalah sebuah rencana atau pernyataan mengenai tujuan-tujuan tertentu oleh suatu pemerintah sedangkan politik Islam adalah sebagai tindakan untuk mengatur negara berdasarkan ajaran Islam

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian adalah seperangkat metode (cara) yang bersifat sistematis dan terorganisasi untuk mengidentifikasi sebuah topik atau judul Penelitian serta untuk memecahkan masalah yang dirumuskan dalam rumusan tersebut.⁴⁰ Penelitian adalah percobaan yang hati-hati dan kritis untuk menemukan sesuatu yang baru. Penelitian dapat digolongkan atau dibagi ke dalam beberapa jenis berdasarkan kriteria-kriteria tertentu, diantaranya adalah penelitian berdasarkan: pendekatan, tujuan, tempat, bidang ilmu yang diteliti, dan teknik yang digunakan.⁴¹ Penelitian yang dimaksud adalah:

³⁹Abul Karim, *Islam Nusantara*, Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2007.hlm 26.

⁴¹Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineke Cipta. 1988. 125.

1) Pendekatan

Pendekatan sosiologis adalah bertujuan untuk memahami arti subjektif dari kekuasaan sosial bukan semata-mata menyelidiki arti objektif. Dari sisi ini, tampaklah fungsionalisasi sosiologi mengarah pengkajian sejarah pada pencarian arti yang dituju sehingga pengetahuan teoritislah yang akan mampu membimbing penelitian dalam menentukan motif-motif dari suatu tindakan atau faktor-faktor dari suatu peristiwa.

I. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dengan model penelitian kepustakaan (*Library research*), data kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁴² Menurut Kirk dan Miller, kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergabung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.⁴³

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sekunder.

Sumber primer adalah kesaksian dari seorang saksi dengan mata kepala sendiri

⁴²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineke Cipta, 2010. 14

⁴³*Ibid.* Hlm 3

atau saksi dengan panca indera yang lain, atau dengan alat mekanis seperti diktafon, yakni orang atau alat yang hadir pada peristiwa yang diceritakannya (saksi mata), akan tetapi sumber primer tidak perlu asli dalam arti hokum dari kata asli. Sumber sekunder adalah kesaksian dari pada siapapun yang bukan merupakan saksi pandangan mata, yakni dari seseorang yang tidak hadir pada peristiwa yang dikisahkannya.⁴⁴Sumber primer yang digunakan pada penelitian ini diantaranya adalah: buku yang ditulis oleh Tabrani Syabirin (2014) berjudul “*Menjinakkan Islam (Strategi Politik Orde Baru)*”, buku yang ditulis Jusuf Wanandi (2014) “*Mennyibak Tabir Orde Baru (Memoar Politik orde baru 1965-1998)*”, buku yang di tulis oleh Ramadhan K.H (1989) berjudul “*Soeharto, pikiran, ucapan dan tindakan saya*”,buku yang ditulis oleh (1996) berjudul “*Islam dan Negara (dalam politik Orde Baru)*”.Sumber sekunder yang digunakan pada penelitian ini berupa jurnal dan buku-buku relevan lainnya.

Untuk mengumpulkan sumber-sumber pada penelitian ini digunakan metode sejarah yang terdiri dari empat tahap yaitu *Heuristik, Verifikasi, Interpretasi, dan Historiografi*.

1. *Heuristik*

Heuristik berasal dari bahasa Yunani *heurishen*, artinya memperoleh. Heuristik adalah suatu teknik, suatu seni, dan bukan suatu ilmu. Merupakan suatu keterampilan dalam menemukan, menangani dan memperinci bibliografi, atau

⁴⁴Lois Gottschalk, *Mengerti Sejarah: Pengantar Metode Sejarah* (terj. Notosusanto), Jakarta: Yayasan Universitas Indonesia, 1975. 35.

mengklasifikasikan dan merawat catatan-catatan.⁴⁵terdahulu itu. Dengan demikian, peneliti mulai dapat menjangrik sebanyak mungkin jejak-jejak sejarah mengenai kebijakan politik Orde Baru, dengan selalu bertanya apakah itu merupakan data sejarah.

2. *Verifikasi* (Kritik Sumber)

Setelah sumber sejarah dalam berbagai kategorinya itu terkumpul, tahap yang berikutnya ialah verifikasi atau lazim disebut juga dengan kritik untuk memperoleh keabsahan sumber. Dalam hal ini kritik sumber terbagi menjadi dua yaitu kritik ekstern dan kritik intern. Kritik ekstern adalah keabsahan tentang keaslian sumber (otentisitas).⁴⁶Peneliti melakukan pengujian atas asli atau tidaknya sumberberarti ia menyeleksi segi-segi fisik dari sumber yang ditemukan atau setidaknya dapat diuji berdasarkan sebuah pertanyaan-pertanyaa seperti kapan sumber itu dibuat, dimana sumber dibuat, dan siapa yang membuat. Kritik intern menguji sumber tentang kesahihan sumber (kredibilitas).⁴⁷Pada kritik intern ini pertanyaan pokok untuk menetapkan kredibilitas ialah “nilai bukti apakah yang ada didalam sumber?”.Kesaksian dalam sejarah merupakan faktor paling menentukan sah dan tidaknya bukti atau fakta sejarah.

J. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang relevan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik studi pustaka.Teknik studi pustaka adalah suatu cara mengumpulkan data dan mempelajari data dari literature yang dianggap

⁴⁵Dudung Abdurrahman, *Metode Penelitian sejarah*, Jakarta: LogosWacana Ilmu. 1999. 55.

⁴⁶Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Sejarah*, hlm.59

⁴⁷*Ibid*, hlm .61

relevan.⁴⁸Dalam teknik studi pustaka ini peneliti melakukan kegiatan membaca, mencatat dan mengkategorikan data menurut sub-sub masalah. Tujuan pengkategorian ini adalah agar tidak terjadi kekeliruan dan dapat memudahkan peneliti dalam penyusunan hasil penelitian.

1. Teknik Analisis Data

Pengertian teknik analisis data sendiri adalah proses penghimpunan atau pengumpulan, pemodelan transformasi data dengan tujuan untuk menyoroti dan memperoleh informasi yang bermanfaat, memberika saran, kesimpulan dan mendukung pembuatan keputusan.⁴⁹*Interpretasi* atau penafsiran sejarah seringkali disebut juga dengan analisis sejarah. Analisis sendiri berarti menguraikan, dan secara termonologi berbeda dengan sintesis yang berarti menyatukan. Namun keduanya, analisis dan sintesis dipandang sebagai metode-metode utama dalam interpretasi.⁵⁰Pada tahap ini peneliti melakukan sintesis atas sejumlah fakta yang diperoleh dari sumber-sumber sejarah tentang kebijakan politik Orde Baru dan bersama-sam dengan teor-teori disusunlah fakta itu kedalam suatu interpretasi yang menyeluruh. Peneliti akan melakukan perbandingan dengan data tersebut dan melakukan serangkaian secara abstrak untuk membentuk struktur penulisan yang baik.

⁴⁸Muhammad Sudrajad Subana, *Dasa-dasar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Pustaka Setia, 2005.77

⁴⁹Dudung Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah*, Logos Wacana Ilmu. 1999. 64.

K. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini yang berjudul” *Kebijakan Orde Baru Terhadap Politik Islam di Indonesia*” terdiri lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

- Bab I merupakan pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, tinjauan pustaka, kerangka teori, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- Bab II pada bab ini adalah mengenai latar belakang berdirinyapemerintahn Orde Baru di Indonesia yaitu: Gagalnya Gerakan 30 September, Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) dan Sidang Pengangkatan Soeharto menjadi Presiden RI.
- Bab III adalah kebijakan pemerintah Orde Baru terhadap politik Islam di Indonesia tahun 1966-1990. Yaitu: Soeharto dan Dwifungsi ABRI, penyederhanaan Partai Politik, dan Sikap Soeharto terhadap organisasi Islam
- Bab IV adalah dampak kebijakan politik Orde Baru. Menurunnya jumlah suara partai politik Islam tahun 1971-1987
- Bab V merupakan penutup berisi simpulan, saran dan rekomendasi

L. Historiografi

Langkah terakhir dalam penelitian sejarah adalah historiografi.⁵¹ Merupakan cara penulisan, pemaparan, atau pelaporan hasil penelitian sejarah yang telah dilakukan. Pada tahapan terakhir dalam penelitian ini, peneliti melakukan penulisan sejarah dengan tujuan hasil yang ditulis dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai proses penelitian dari awal sampai akhir. Berdasarkan penulisan tersebut akan dapat dinilai apakah penelitiannya berlangsung sesuai dengan prosedur yang dipergunakannya atau tidak, memiliki validasi dan rehabilitasi yang memadai atau tidak, sehingga penulisan sejarah itu akan dapat ditentukan mutu penelitian.

⁵¹A. Daliman, *Metode Penelitian Sejarah*, Yogyakarta: Ombak. 2012. 99.

BAB II

LANDASAN HISTORIS MUNCULNYA ORDE BARU

A. Kondisi Global Politik di Indonesia

Partai komunis merupakan partai besar pada masa kepemimpinan Presiden Soekarno. Konsep penyatuan tiga ideologi yang dilakukan oleh Soekarno dengan menyatukan ideologi nasionalis, agamis dan komunis (Nasakom), merupakan suatu bentuk paksaan demi mempertahankan kekuasaan. Ketiga ideologi yang mempunyai perbedaan visi dan misi tersebut telah membawa perpecahan sehingga ketidaksepahaman ketiga ideologi tersebut telah membawa kepada peristiwa besar di Indonesia, dengan komunis menginginkan perubahan ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Sehingga memaksa para tokoh-tokoh bangsa untuk mau mengikuti keinginan komunis tersebut. Tragedi tersebut dikenal dengan nama Gerakan 30 September, peristiwa tersebut telah membawa dampak bagi bagi kondisi Politik, sosial dan ekonomi.

Kondisi Politik, tahun 1965-1966 merupakan tahun yang kelam bagi masyarakat Indonesia, karena pada tahun itu peristiwa Gerakan 30 September terjadi, para petinggi militer Indonesia ditangkap dan dibunuh oleh kelompok orang yang ingin mengukudeta pemerintahan saat itu, beberapa kantor pemerintahan diantaranya kantor RRI berhasil dikuasai oleh kelompok yang mengatas namakan PKI, situasi tersebut mengakibatkan kondisi politik, sosial dan ekonomi menjadi kacau.

Kondisi Sosial, tahun 1965-1966 merupakan tahun yang kelam bagi masyarakat Indonesia, karena pada tahun itu telah terjadi Inflasi yang sangat mempengaruhi kehidupan rakyat Indonesia yang mempunyai pendapatan kelas menengah kebawah. Krisis ekonomi telah membawa masyarakat mengalami kesulitan dan terus menambah daftar kemiskinan. Kondisi tersebut telah membawa penurunan kepercayaan rakyat terhadap Soekarno, rakyat yang tergabung dengan mahasiswa melakukan demonstrasi menuntut Soekarno untuk melakukan perbaikan terhadap kestabilan ekonomi sehingga rakyat hidup aman dan sejahtera.

Kondisi Ekonomi, pada tahun 1965 ekonomi rakyat pada saat itu mengalami inflasi yang mencapai 65% membuat harga makanan melambung tinggi membuat rakyat menjadi kelaparan. Pemerintah melakukan devaluasi pada bulan Desember 1965 menjadikan uang senilai Rp 1000 menjadi Rp 1. Sehingga uang rupiah baru mestinya dihargai 10 kali lipat lebih tinggi. Maka tindakan pemerintah untuk menekan angka inflasi ini malah meningkatkan angka inflasi.

Kondisi politik, sosial ekonomi telah memaksa rakyat melakukan demonstrasi menuntut Soekarno melakukan perbaikan dari berbagai bidang, demonstrasi tersebut didukung juga oleh TNI sehingga keadaan semakin buruk. Peristiwa 30 September telah membuka jalan kepada Soeharto untuk menjadi penguasa di Indonesia dengan dukungan dari ABRI dan dari rakyat-rakyat Indonesia yang sudah tidak menaruh kepercayaan lagi terhadap Soekarno.

Orde Baru, nama tatanan sosial-politik baru Indonesia setelah Presiden Soekarno, pada dasarnya adalah sebuah rezim militer yang letak kekuasaan

pemerintahan dikuasai oleh angkatan bersenjata. Tentara Indonesia tidak pernah membatasi dirinya hanya sebagai kekuatan militer. Pada masa revolusi tahun 1945-1949, tentara terlibat dalam peperangan perjuangan kemerdekaan dimana tindakan politik dan militer saling menjalin tak terpisahkan.

Tahun 1948 Periode penting pertama yang mempengaruhi struktur dan cara berikir militer kita adalah ketika Mohammad Hatta menginginkan pembagian “postur” (TNI AD, AL, AU) demi efisiensi dan profesionalisme. Kebijakan ini menimbulkan bentrokan antar tentara dimana-mana. Pada tahun 1948 , pasukan Siliwangi yang mundur dari Jawa barat pasca perundingan Renville, baku tembak dengan Laskar Senopati yang berbasis di Solo.

Konflik terus berlanjut sampai Oktober 1952, ketika itu, didorong oleh ketidakpuasan dan sejumlah perseteruan internal, beberapa elit militer memobilisasi demonstrasi memaksa presiden Soekarno membubarkan parlemen. Setelah pemilihan umum 1955, sejumlah elit militer dan elit politik melakukan kerjasama dengan partai politik, diantaranya dengan partai komunis Indonesia (PKI), partai sosialis Indonesia (PSI) dan Masyumi. PSI dan Masyumi, meneklarasikan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia dan Perjuangan rakyat Semesta (PRRI) di Sumatera Barat dan sebagian di Sulawesi serta di Jawa Barat DI/TII.

Konflik internal yang berkepanjangan telah melebar dan meluas kepadakonflik-konflik politik, tahun 1965 telah terjadi peristiwa internal (TNI AD dan TNI AU) dan juga konflik politik (perubahan ideologi) yang mengakibatkan banyak korban jiwa. Peristiwa tersebut terus meluas dan telah

membawa dampak sosial dan ekonomi, sehingga menuntut untuk pergantian pemerintahan (Presiden). Aksi demo yang terjadi hampir diseluruh nusantara telah dimanfaatkan bagi segolongan militer untuk melakukan dukungan demi kesetabilisan politik nasional. Dengan demikian telah membuka jalan bagi para ABRI untuk melakukan pergantian kepemimpinan dari Orde Lama ke Orde Baru.

Dari uraian diatas ditegaskan bahwa munculnya Orde Baru dan Soeharto sebagai tokohnya dilatarbelakangi Instabilitas politik yang mengalami penurunan, sehingga membuka ruang terhadap ABRI dan Soeharto muncul dipanggung politik sebagai penguasa. Untuk memudahkan pembaca mengetahui bagaimana latar belakang munculnya Orde Baru, maka penulis telah menulis tiga Sub bab yang perlu diketahui mengenai sejarah munculnya pemerintahan Orde Baru, yakni; Gagalnya Gerakan 30 September, Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) dan Pengangkatan Soeharto menjadi Presiden.

B. Gagalnya Gerakan 30 September

Hadirnya partai Komunis di Indonesia telah membawa warna baru dalam perpolitikan di Indonesia, pada masa Pemerintahan Soekano PKI menginginkan adanya perubahan ideologi Sosial-Komunis yang menggantikan ideologi Pancasila, sehingga pada malam 30 September, PKI dan para pendukungnya melakukan teror terhadap para petinggi negara supaya untuk mendukung dan mengabdikan mereka merubah ideologi bangsa.⁵²

⁵²Eliseo. *Tragedi Malam 30 September 1965*, Hlm.1

Orde Baru, nama tatanan sosial-politik baru diIndonesia pasca Presiden Soekarno, pada dasarnya adalah sebuah rezim militer yang menggurita dengan tentakel di mana-mana. Bersenjatakan Dwi Fungsi, para punggawa Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menceburkan diri bulat-bulat kedalam semua gelanggang politik. Mereka ada disemua level pemerintahan: dari Kepala Desa, Camat, Bupati, Kepala Dinas, Gubernur, direktur jenderal sampai Kementerian.

Tentara Indonesia tidak pernah membatasi dirinya hanya sebagai kekuatan militer. Tentara terlibat didalam perjuangan kemerdekaan dimana tindakan politik dan militer saling menjalin dan tak terpisahkan, peran itu bisa dirunut dan terus dikembangkan terutama oleh Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal Abdul Haris Nasution. Soeharto terus mengambangkan konsekuensi tersebut. Pada akhirnya menghasilkan sebuah fiksi tunggal yang melejit menjadi kekuatan politik baru, membuka jalan bagi kemunculan Orde Baru.⁵³

Setelah Proklamasi kemerdekaan tahun 1945 resmilah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 (UUD 45) dijadikan pijakan dalam mengelola negeri ini. Bagi Partai Komunis Indonesia (PKI), kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 dan pengakuan kedaulatan oleh Belanda pada 27 Desember 1949 akibat persetujuan Konfrensi Meja Bundar (KMB), belum merupakan kemerdekaan penuh. Menurut PKI, persetujuan KMB yang menyebabkan Indonesia mempunyai ikatan-ikatan tertentu dibidang ekonomi dan keuangan dengan Belanda, sementara Irian Barat masih merupakan daerah sengketa adalah merupakan bukti bahwa Indonesia masih setengah jajahan.

⁵³Joeniarto. *Pemikiran politik*, Hlm.11

Disamping itu, adanya sisa-sisa feodalisme didesa-desa dengan para tuan tanah penindas kaum tani, yang menunjukkan bahwa Indonesia juga merupakan Negara setengah feodal. Maka, PKI berkesimpulan bahwa selama kedua kekuatan itu belum terhapus, rakyat akan tetap menderita. Berarti bahwa tujuan kemerdekaan untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur tidak tercapai.⁵⁴

Uraian ini menegaskan bahwa rakyat Indonesia mengalami penindaan ganda dari imperialisme dan feodalisme. Penindasan ini menyebabkan rakyat Indonesia, terutama kaum tani yang merupakan sebagian besar rakyat, sangat menderita. Akibat lainnya, industri dan kebudayaan nasional tidak bisa berkembang. Jika imperialisme adalah lawan nasional Indonesia, feodalisme adalah lawan masa rakyat. Antara kedua kelompok kekuatan itu terdapat pertentangan-pertentangan yang tajam. Karena musuh revolusi Indonesia adalah imperialisme dan feodalisme, maka tugas-tugas terpenting revolusi adalah mengusir imperialisme dan feodalisme sebagai musuh dari luar, dan menjalankan revolusi demokrasi untuk menghapuskan tuan-tuan tanah feodal dalam negeri. Perlawanan terhadap kedua kekuatan itu tidak dapat dipisahkan, dan harus dikerjakan sekaligus. Dalam propagandanya, PKI selalu menjanjikan bahwa jika partai Komunis berkuasa, petani-petani yang tidak memiliki tanah akan mendapatkannya secara Cuma-Cuma. Bahkan jika petani memilih partai komunis dalam pemilihan umum sama dengan memilih tanah, dan bagi kaum buruh berarti beras, upah yang pantas, dan jaminan sosial yang adil. Semboyan persatuan antara suku, agama, partai golongan, dan perseorangan senantiasa didengungkan, tapi itu

⁵⁴A. Syafi'i Maarif, *Islam dan Politik (teori Belah Bambu Masa Demokrasi dipimpin 1959-1965)*, Jakarta: Gema Insani Press. 1996. hlm. 156.

bertujuan mencegah berkuasanya kembali pemimpin-pemimpin Masyumi dan PSI.⁵⁵

Menurut analisis PKI, dalam masyarakat Indonesia modern terdapat pertentangan-pertentangan pokok antara imperialisme dan feodalisme dan nasionalisme Indonesia, dan antara feodalisme dengan massa rakyat. Bagi PKI, imperialisme itu tertuju ke negara-negara Barat, khususnya Belanda dan Amerika Serikat. Maka kekuatan progresif dengan PKI sebagai intinya harus menghancurkannya. Namun PKI merasa belum cukup mampu menghadapinya, sehingga mereka mencari golongan tengah yang dapat diajak bekerja sama. Partai Nasional Indonesia (PNI) sebagai inti kekuatan tengah sampai batas tertentu dapat “dijinakkan” PKI untuk kepentingan politiknya. Aliansi dengan Soekarno berhasil juga dibina karena saling membutuhkan. Soekarno membutuhkan PKI dalam rangka politik *balance of power*-nya, dan PKI membutuhkan Soekarno sebagai tempat berlindung dari kecurigaan tentara dan orang-orang pemerintah.

Tugas-tugas revolusi Indonesia menurut versi PKI erat sangkutannya dengan sasaran-sasaran pokok revolusi, yaitu mengusir imperialisme sebagai musuh dari luar, dan menjalankan revolusi dalam negeri untuk menghapuskan feodalisme. Pembubaran Masyumi dan PSI juga merupakan bagian dari tuntutan PKI yang dilaksanakan oleh Presiden Soekarno. Namun ambisi PKI untuk duduk dalam kabinet, sampai 1960 tidak pernah menjadi kenyataan karena kuatnya oposisi dari tentara.⁵⁶ Watak revolusi Indonesia menurut PKI barulah nasional demokratis,

⁵⁵A. Syafii Maarif, *Islam dan Politik*, hlm. 158

⁵⁶Djamhari, *Sejarah Surat Perintah 11 Maret 1966*, Hlm.57

belum proletar sosialis. Dalam tingkatan ini, PKI merasa perlu menarik kekuatan –kekuatan lain ke pihaknya untuk kepentingan politik PKI.

Kalau golongan-golongan lain di Indonesia menetapkan bahwa pembentukan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila adalah tujuan kemerdekaan Indonesia. Bagi PKI, hari depan revolusi Indonesia adalah sosialisme dan komunisme. Ini berarti bahwa penerimaan PKI kepada Pancasila hanyalah taktik belaka. *Last but not least*, pemimpin-pemimpin PKI umumnya hidup sebagai pemimpin borjuis di tengah rakyat miskin, dan membela pemerintah yang mampu menaikkan tarap hidup rakyat. Dengan kenyataan ini PKI sebenarnya adalah bukan pembela rakyat tertindas. Secara organisasi politik, PKI adalah partai yang paling berdisiplin, hingga memungkinkannya menjadi partai yang terorganisasi baik sampai saat kejatuhannya di akhir 1965. Partai-partai lain dilihat dari sudut disiplin organisasi, tidak ada yang dapat menandinginya.⁵⁷

Nasionalis Agamis dan Komunis (NASAKOM) yang pada akhirnya konsep yang dikeluarkan oleh Soekarno akan membawa konflik politik dengan munculnya peristiwa besar. Hal yang menarik dari konflik-konflik antar partai yang berlangsung sepanjang era Demokrasi terpimpin, adalah sikap dan tanggapan Presiden Soekarno terhadap peristiwa tersebut.⁵⁸ Dimasa Demokrasi Terpimpin Soekarno menyalurkan ide lamanya NASAKOM, suatu pemikiran yang ingin menyatukan nasionalis sekuler, Islam dan Komunis. Presiden Soekarno yang memegang teguh untuk mempertahankan konsep NASAKOM

⁵⁷Samsudin. *Idiologi Hegemoni*, Hlm.59

⁵⁸Harnold Crouch, *Militer dan Politik di Indonesia*, Jakarta: Sinar Harapan, 1986.hlm 67.

(Nasionalis Agamamis dan Komunis) telah mendatangkan tragedi nasional dengan peristiwa Lubang Buaya tahun 1965.

Kenekatan Soekarno menggandengkan tiga ideologi yang bertolak belakang itu, setelah ia melihat kondisi objektif masyarakat Indonesia. Menurut pengamatan Soekarno, semenjak zaman kolonial ketiga ideologi tersebut telah hidup ditengah masyarakat dan sama-sama berjuang mengusir penjajah Belanda.⁵⁹ Setelah Indonesia merdeka, tiga aliran tersebut mengkristalkan diri dalam wadah politik, dimana satu sama lain bersaing ingin menang. Pertarungan ideologi ini kemudian juga mengkrystal dalam konflik partai.⁶⁰ Sampai hancurnya Orde Lama ada beberapa aliran yang bertarung untuk memperebutkan tempat tertinggi dalam percaturan politik nasional, ada lima aliran besar yang saling saling berebut pengaruh; Nasionalisme Radikal, Tradisionalisme Jawa, Islam, Sosialisme Demokrat dan Komunisme.⁶¹

Nasionalisme radikal lebih dominan diserap oleh PNI, dalam pemilu 1955, PNI berhasil memperoleh suara paling banyak 22,3%. Suara PNI ini 80% diperoleh dari daerah pulau Jawa yang merupakan daerah yang padat penduduknya. Sokongan terhadap ide-ide nasionalisme Indonesia memang pada mulanya berasal dari pulau Jawa yang tergolong abangan dalam beragama. Islam secara ideologi ditampung oleh dua partai Islam Masyumi dan NU. Sebagai partai kaum modernis, Masyumi dalam pemilu 1955 berhasil mendapatkan 20,9% suara. Tradisionalime Islam tertampung dalam partai NU dengan perolehan suara 18% suara. NU meraih 80% suaranya di Jawa dan Kalimantan. Tradisionalisme Islam

⁵⁹Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002. Hlm 270.

⁶⁰J. Eliseo. Rocamora. *Nasionalime Mencari Idiologi*, Jakarta: graffiti, 1991. Hlm 10.

⁶¹A. Syafi'i Maarif, *Islam dan Politik*, Hlm. 11.

banyak diserap oleh PNI, NU, PKI dan kalangan militer.⁶² Sosialis demokrat yang diwakili oleh PSI umumnya dipimpin oleh cendekiawan tamatan sekolah Barat. Tapi dalam pemilu 1965, PSI hanya memperoleh 2 persen suara atau 5 kursi di konstituante. Sebelum pemilu 1955 konflik ideologi antar golongan ini belumlah terlalu runcing, hal itu dapat dilihat dari susunan kabinet koalisi dari beberapa partai.

Akan tetapi, idenya itu dilaksanakan dengan caranya sendiri. Peranan partai mengalami penurunan, kecuali PKI yang memainkan peranan penting dan diliputi dengan semangat yang tinggi. Pancasila pun ditafsirkan sesuai dengan pemikirannya. Masa ini, karena lebih didominasi oleh PKI, memandang ketegangan antara Islam dan komunis. Ketidakpuasan juga terjadi dikalangan banyak golongan nasionalis “sekuler” dan angkatan bersenjata.⁶³ Kehancuran Demokrasi Terpimpin terjadi setelah pemberontakan yang dilakukan oleh gerakan PKI 30 september 1965. Umat Islam bersama ABRI dan golongan lainnya bekerjasama menumpas gerakan itu. Berpegang pada selembur surat perintah tanggal 11 Maret 1966 (Supersemar), Jenderal Soeharto, pemegang mandat, mengambil langkah-langkah untuk menyelamatkan negara.

Terhitung sejak tanggal tersebut dibangun sebuah “Orde Baru” pengganti “Orde Lama.”⁶⁴ Ketegangan-ketegangan politik terus berlanjut, dan menjelang peristiwa G30S, secara jelas yang terjadi adalah polarisasi antara PKI berhadapan dengan lawannya, suatu koalisi yang mencakup Angkatan Darat, NU, sayap kanan

⁶²Tabrani Syabirin, *Menjinakkan Islam Strategi Politik Orde Baru*, Jakarta: Teras. 2014. Hlm 33.

⁶³Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002. Hlm 269.

⁶⁴*Ibid*, hlm 270

PNI, golongan Muslim diluar NU, terutama mereka yang punya hubungan dengan bekas Partai Masyumi, seperti HMI dan PII serta sejumlah cendikiawan anti komunis (kelompok PSI) dan juga kelompok-kelompok Kristen dan Khatolik. Mereka semakin merapatkan barisan, sambil sejenak melupakan perbedaan-perbedaan fundamental yang sebenarnya ada pada mereka. Sementara posisi Soekarno sendiri tetap berusaha memelihara keseimbangan diantara kekuatan-kekuatan tersebut, meski secara umum tetap dengan keberpihakan yang lebih condong kepada golongan kiri, sampai saat meletusnya peristiwa G30S.⁶⁵ Babak baru dari pertarungan ideologi antara sesama anak bangsa Indonesia ini diawali oleh sebuah peristiwa kudeta yang terjadi pada pagi hari tanggal 1 Oktober 1965, pelaku dari tindakan kudeta itu adalah sejumlah perwira Angkatan Bersenjata dari berbagai kesatuan, khususnya dari unsur-unsur Angkatan Udara dan Angkatan Darat. Mereka menamakan gerakan mereka dengan nama “Gerakan 30 September”.⁶⁶

Kekuatan inti dari kelompok kudeta adalah batalion I KK Cakrabirawa pimpinan Letan Kolonel Untung, yang juga pimpinan tertinggi, batalion 454/Raiders Diponegoro, Batalion 530/Raiders Brawijaya, beberapa peleton dari Brigade Infantri I Jaya, serta sejumlah orang sipil dari unsur-unsur ormas kiri. Gerakan itu berhasil menangkap (menculik) enam orang perwira tinggi dikarenakan suatu kekeliruan, seorang perwira pertama AD dari rumah mereka masing-masing. Mereka masing-masing adalah Letjen Ahmad Yani (Menteri Panglima Angkatan Darat), Mayjen Soeprapto (Deputi Administrasi Menpangad), Mayjen

⁶⁵Harnold Crouch, *Militer dan Politik di Indonesia*, Jakarta: Sinar Harapan, 1986.hlm 22.

⁶⁶Sulastomo, *Hari-Hari yang panjang 1963-1966*, Jakarta:masagung, 1990, hlm.11.

Harjono Mas Tirtodarmo (Deputi III Mengpangad), Mayjen S. Parman (Asisten I Mengpangad), Brigjen Donald Izaacus Panjaitan (asisten IV Menpangad), dan Mayjen Soetojo Siswomihardjo (Kepala Oditoriat militer AD). Satu target mereka Jenderal Abdul Haris Nasution (Menteri Pertahanan Keamanan/Kepala Staf Angkatan Bersenjata) berhasil meloloskan diri. Akan tetapi ajudannya, seorang perwira pertama berpangkat Letnan satu ikut diculik dan dibawa ke Lubang Buaya.⁶⁷

Sejumlah dukungan terhadap Gerakan 30 September juga muncul pada 1 Oktober. Atas nama korpsnya, panglima AURI Omar Dhani, yang sudah tahu sebelumnya akan adanya gerakan tersebut, menyatakan mendukung sepenuhnya terhadap Gerakan 30 September, dan menambah bobot politis dan militer dari gerakan. Di Semarang, Solo dan Yogyakarta, sejumlah perwira menengah di jajaran Divisi Diponegoro. Yang merupakan kawan-kawan untung.⁶⁸ Reaksi yang paling menentukan datang dari arah yang mungkin tidak diduga sebelumnya, yaitu dari Pangkostrad Mayjen Soeharto, sedikit-demi sedikit Soeharto berhasil menguasai Lapangan monumen nasional (monas). Ia mengambil alih RRI pada pukul tujuh dan membacakan pidato pertamanya kepada bangsa Indonesia didalam dan diluar negeri bahwa ia menentang Dewan Revolusi.⁶⁹

Kerja sama yang erat terjadi antara pimpinan baru Angkatan Darat yang dipimpin oleh Soeharto dengan kekuatan-kekuatan anti komunis yang ada di tingkat pusat dan daerah. Sudah sejak tanggal 12 Oktober ormas-ormas dan partai-

⁶⁷Taufik Abdullah. Dkk. *Malam Bencana 1965 dalam Belitan Krisis Nasional*, Jakarta: Yayasan Pusaka Ober Indonesia, 2013. Hlm 24.

⁶⁸*Ibid.* Hlm. 27

⁶⁹Jusuf Wanandi, *Menyibak Tabir Orde Baru (memoir Politik Indonesia 1965-1998)*, Jakarta: Jakarta: Kompas, 2014. Hlm. 42.

partai politik nonkomunis berhasil didekati oleh militer untuk melakukan kerja sama dan koordinasi dalam menghadapi PKI dan sekutu-sekutunya. Pertemuan ini berhasil mengkonsolidasikan kekuatan-kekuatan sipil anti komunis dalam sebuah wadah yang bernama Kesatuan Aksi Pengganyangan Gerakan September 30 atau biasa disingkat dengan nama “GESTAPU”.⁷⁰ Samsudin menguraikan beberapa sebab kegagalan G 30 S/PKI;⁷¹

a) lemahnya Leadership. Kegagalan PKI dalam melancarkan kudeta terletak pada blunder para pimpinan topereka. Pada awalnya menurut rencana Jakarta akan dijadikan sebagai daerah pusat pemberontakan dan seterusnya PKI harus melakukan penetrasi lebih dalam ke daerah-daerah.

Pada rencana awal, pemberontakan akan dipimpin oleh Aidit sendiri dengan dibantu oleh biro khususnya. Namun beberapa jam setelah kudeta dianggap gagal. Aidit sebagai pimpinan tertinggi gerakan memilih untuk melarikan diri dari Jakarta.

b) gerakan yang tidak serentak. Pemberontakan PKI gagal dimaksimalkan lantaran gerakan hanya berpusat di Jakarta saja dan tidak serentak dilakukan di kota-kotaa lain. Andaikan PKI dengan serentak melakukan pemberontakan maka pihak Angkatan Darat akan kesulitan untuk menumpasnya. Hal ini yang menyebabkan Mayjen Soeharto dengan begitu mudah menumpas gerakan pemberontakan PKI.⁷²

⁷⁰*Ibid.* Hlm. 44

⁷¹Victor, M. fik *Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi Tentang Konpirasi*, Jakarta: Yayasan Obor. 2005. Hlm 35.

⁷²*Ibid.* Hlm. 36

- c) Syam Kazarusman, salah satu lagi faktor penentu kegagalan PKI adalah faktor kegagalan memperkirakan dukungan TNI terhadap kudeta PKI. Awalnya diperkirakan gerakan PKI akan memperoleh dukungan yang signifikan termasuk dari sebagian besar TNI Angkatan Darat, namun ternyata pada dasarnya pada saat bantuan tersebut tidak pernah ada. Syam tidak memperhitungkan bahwa jutaan kader PKI pada waktu itu belum siap untuk mengangkat senjata dalam hal ini berperang. Parahnya, Aidit menuruti ucapan Syam dengan melancarkan kudeta, mis koordinasi antara kader PKI dengan pihak militer pro-PKI membuat anggota PKI yang jumlahnya jutaan tersebut tidak dapat berbuat apa-apa atau tidak dapat digunakan.
- d) Keberhasilan Mayjen Soeharto, Soeharto menjadi sosok di balik suksesnya penumpasan pemberontakan PKI, keputusan Soeharto yang dengan tepat terbunuhnya para Jenderal menjadikan kekuatan-kekuatan anti PKI bersatu dibawah komandonya. Selain itu Mayjen Soeharto berhasil meyakinkan TNI Angkatan Darat untuk tetap setia, inilah kunci dengan segera PKI dapat ditumpas. Praktis Mayjen Soeharto dengan leluasa menggunakan kekuatan TNI angkatan darat dan umat Islam membasmi sisa-sisa pemberontakan yang masih ada. Kekuatan Mayjen Soeharto ini tidak lepas dari melemahnya koordinasi dan nyali para petinggi PKI termasuk tentara yang pro PKI. Namun yang lebih menentukan lagi adalah keberpihakan umat Islam kepada Soeharto untuk menumpas PKI. Kekuatan Islam telah

berhasil dimanfaatkan oleh Soeharto menumpas Gerakan 30 September hingga berdirinya pemerintahan orde baru.⁷³

Menurut Samsudin, dari catatan dokumen Abdul Haris Nasution disebutkam adanya fakta-fakta kegagalan G30S pada pelaksanaannya;*Hari Pertama*, berita yang masuk Jenderal Nasution telah disergap, tetapi lari. Kemudian tim pimpinan kelihatan agak bingung dan tidak memberikan perintah selanjutnya serta menyusul berita bahwa Jenderal Nasution bergabung dengan Jenderal Soeharto dan Jenderal Umar Dhani Kostrad. Setelah menerima berita inipun, pimpinan operasi tidak menarik kesimpulan apa-apa. Setelah mendengar berita ketika pasukan pimpinan Soeharto diketahui akan membalas serangan, pimpinan ternyata tidak memiliki ofensif *geest* lagi.

Hari Kedua, Samsudin menegaskan kawan-kawan pimpinan dari G30S kumpul di Lubang Buaya, kesatuan RPKAD mulai masuk menyerang, keadaan mulai “*wanonderlijk*” (kacau). Pasukan pemuda belum biasa menghadapi praktik perang sesungguhnya. Kemudian diadakan rapat, diputuskan memberhentikan perlawanan, masing-masing bubar, kembali kerumahnya, sambil menunggu situasi batalion Jawa Tengah dan sisa batalion Jawa Timur yang masih ada akan diusahakan untuk kembali kedaerah asalnya, hari itu juga keluar perintah dari Presiden Soekarno agar pasukan di tempatkan masing-masing dan akan diadakan perundingan. Akan tetapi pasukan tetap melakukan penyerang terhadap markas PKI di bandara Halim Perdana Kusumah.⁷⁴

⁷³Tabrani Syabirin, *Menjinakkan Islam Strategi Politik Orde Baru*, Jakarta: Teras. 2014. Hlm 43.

⁷⁴*Ibid.* Hlm 44

Hari Ketiga dan Keempat, Kesalahan fatal yang dilakukan DN Aidit adalah bahwa dia telah meninggalkan Jakarta dan lari ke Jawa Tengah. Seharusnya dia tidak melakukan hal tersebut. DN Aidit lari ke Jawa Tengah dini hari pada tanggal 2 Oktober 1965, beberapa jam setelah Soeharto mulai mengambil inisiatif menghentikan KUP. Pada saat itu seharusnya DN Aidit bersikap *all out* dalam melancarkan KUP. Walaupun sudah agak terlambat, seharusnya dia memerintahkan untuk menggerakkan KUP di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Melihat persiapan yang dilakukan sebelumnya, terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur. DN Aidit pasti akan mendapat mengimbangi inisiatif dan gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Soeharto di Jakarta. Apalagi di kedua provinsi ini pendukung PKI sangat kuat. Pada pemilu 1955, tujuh puluh persen suara yang diperoleh PKI berasal dari daerah ini.⁷⁵

Dari uraian di atas bisa ditegaskan bahwa penyebab kegagalan PKI dalam melakukan misinya disebabkan kurang koordinasi di antara para pemimpin Gerakan, dan telah menjadikan suatu keuntungan bagi Soeharto yang pada saat itu telah mampu memberi tekanan kepada PKI, dan membawa nama Soeharto muncul sebagai tokoh yang mampu mengalahkan dan menghilangkan pengaruh-pengaruh PKI terhadap rakyat Indonesia.

C. Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar)

Surat perintah Sebelas Maret (Supersemar) adalah akhir dari kepemimpinan Soekarno secara *de jure*, dengan konsep Nasakom nya Soekarno telah

⁷⁵Mayjen. (Purn) Samsudin, *Mengapa G30S/PKI Gagal*, Jakarta: Obor. 2005. Hlm. 90-91.

memaksakan tiga ideologi yang lebur menjadi satu, dan telah membawa kekacauan politik di Indonesia, sehingga terjadi peristiwa bersejarah yang berakhir pada penurunan Soekarnomenjadi presiden dan di gantikan oleh Soeharto.

Pada tanggal 1 Oktober 1965 suatu peristiwa terjadi di ibu kota Jakarta, yang kemudian berkembang membawa perubahan besar di Indonesia. Pada waktu dini hari tanggal tersebut, enam perwira tinggi dan seorang kapten angkatan darat dibunuh dalam rangka apa yang kemudian disebut peristiwa Gestapu. Beberapa hari keadaan di Jakarta kurang menentu, sampai-sampai keberadaan Soekarno sendiri diberitakan dengan simpang siur. Radio Republik Indonesia (RRI) dikuasai mulanya oleh pihak para perwira. Pengumuman pun dilakukan dengan mengemukakan bahwa kekuasaan berada dalam tangan Dewan Revolusi yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung, wakil komandan Pasukan Pengawal pribadi Presiden “cakrabirawa” pengumuman lain menyusul yang mengatakan bahwa semua perwira paling tinggi berpangkat Letnan. Soekarno, yang rupanya berada di lapangan terbang Angkatan Udara Halim Perdanakusuma, mengangkat Mayjen Pranoto sebagai Panglima Angkatan Darat yang rupanya tidak dapat berfungsi karena ditolak oleh perwira lain.⁷⁶ Sebaliknya Soekarno terpaksa menerima penunjukan Mayor Jenderal Soeharto, Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Kostrad) sebagai panglima, yang segera bergerak mengusut pembunuhan para perwira. Soeharto mendapat perintah dari Presiden Soekarno untuk memulihkan keadaan. Ia berhasil menguasai keadaan, pada itu di ibukota

⁷⁶Delier Noer, *Mohammad Hatta Biografi Politik*. Jakarta: LP3ES. 1990. Hlm. 602.

serta berbagai kota universitas lain nya berjalan demonstrasi-demonstrasi yang dipelopori oleh para mahasiswa dan pelajar.⁷⁷

Unjukrasa ini diikuti oleh rakyat pada umumnya, yang banyak memberi para mahasiswa dan pelajar itu semangat serta makanan, berupa buah-buahan dan nasi bungkus. Para mahasiswa dan pelajar membentuk organisasi Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI), dan Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia (KAPPI); sedangkan golongan golongan lain mendirikan organisasi sejenis seperti Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia (KASI), Kesatuan Aksi Wanita Indonesia (KAWI), Kesatuan Aksi Guru Indonesia (KAGI), Kesatuan Aksi Usahawan Indonesia (KAUI), dan sebagainya. Akhirnya Soekarno terpaksa memberi mandat kepada Letnan Jenderal Soeharto untuk mengatasi keadaan. Ini terjadi pada tanggal 11 Maret 1966, tugasnya adalah:

- a. Mengambil segala tindakan yang dianggap perlu, untuk terjaminnya pemerintahan dan jalannya revolusi, serta menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan pimpinan Presiden/panglima tertinggi/ Pemimpin Besar revolusi/Mandataris MPRS demi untuk keutuhan bangsa dan Negara ajaran Pemimpin Besar Revolusi.
- b. Mengadakan kordinasi pelaksanaan pemerintah dengan panglima angkatan-angkatan lain dengan sebaik-baiknya
- c. Supaya melaporkan segala sesuatu yang bersangkutan paut dalam tugas dan tanggung jawab seperti tersebut diatas.

⁷⁷*Ibid, hlm 602.*

Setelah Soeharto, dengan mandat yang diterima dari Soekarno itu, membubarkan PKI dan semua organisasi yang berafiliasi dengannya, apalagi setelah sidang umum IV MPRS 20-22 Juni 1969, pemerintahpun dibina menurut rencana yang lebih tertib. Pemegang mandat 11 Maret itu, segera membentuk suatu kabinet (Ampera) yang dipimpin oleh presidium yang ia ketuai sendiri. Sejak itu masa yang berjalan disebut masa Orde Baru dan pemerintahannya pemerintahan Orde Baru untuk membedakan masa dan pemerintahan Soekarno yang disebut Orde Lama. Apa lagi setelah sidang istimewa MPRS 7-12 Maret 1967 yang memberhentikan Soekarno sebagai Presiden dan mengangkat Soeharto sebagai penggantinya, pembinaan Indonesia berjalan dengan gaya yang berbeda sama sekali.⁷⁸

Pada 11 Maret 1966, dengan tentara tidak dikenal yang mengepung istana negara, Presiden Soekarno diterbangkan dengan helikopter menuju Bogor. Di sana, Soekarno dikunjungi oleh tiga Jenderal, yang dalam situasi yang masih belum jelas, memperoleh tanda tangan Soekarno pada suatu dokumen yang memberi Soeharto kekuasaan untuk memulihkan situasi. Kekuatan pendukung Soeharto menguntungkan bagi mereka, dengan menggunakan supersemar sebagai senjata untuk mengambil alih kekuasaan dari Soekarno dan sebagai dasar bagi upaya mereka melegitimasi Orde Baru secara konstitusional. Status “suci” yang diberikan terhadap dokumen tersebut dipertegas dengan akronim resmi supersemar yang disusun secara cerdas.⁷⁹

⁷⁸*Ibid, hlm 604*

⁷⁹David Bouchier dan Vedi R. Hadi, *Pemikiran Sosial dan Politik Indonesia (1965-1999)*, Jakarta: PT Pustaka UtamaGrafiti. 2003. Hlm. 43.

Pada awal tahun 1966, dalam situasi inflansi membumbung dan perekonomian kacau, pemerintah Soekarno mengumumkan kenaikan harga bahan bakar. Tindakan ini memberi alasan bagi Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) untuk meningkatkan aksinya. Pada 10 Januari 1966, KAMI mencanangkan Tiga Tuntutan Rakyat (Tritura), yaitu bubarkan PKI, rombak pemerintah/kabinet dan turunkan harga. Tuntutan terakhir ini mendapatkan dukungan penuh dari rakyat yang merasakan dampak merosotnya ekonomi dengan inflasi tinggi sejak awal tahun 1960-an. Pada tahun 1966, laju inflasi mencapai 660 persen.⁸⁰ RPKAD dibawah pimpinan Brigjen Sarwo Edhie Wibowo juga semakin gencar mendukung gerakan mahasiswa dengan menggabungkan diri dalam demonstrasi-demonstrasi. Sejak 10 Januari 1966, puluhan ribu mahasiswa berdemonstrasi di jalanan selama lima belas hari berturut-turut. Puncak demonstrasi mahasiswa dan tuntutananya.

Relasi mahasiswa dan tentara bertambah dekat seiring dengan semakin seringnya terjadi kericuhan antara masa pendukung Soekarno dan para mahasiswa. Pada bulan-bulan pertama 1966, mahasiswa memang makin sering mengadakan unjuk rasa di depan istana, dan makin kencang menuntut pembubaran PKI dan hal itu sesuatu yang berulang kali di tolak oleh Soekarno.⁸¹ pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 1966, situasi Ibukota berbeda dari biasanya. Jalan-jalan disekitar istana telah penuh dengan masa mahasiswa. Sejak pagi-pagi buta mereka telah berada didepan istana. Kampus Universitas Indonesia yang semula dijaga oleh kesatuan-kesatuan KOSTRAD pada hari itu tampak

⁸⁰Jusuf Wanandi, *Menyibak Tabir Orde Baru (memoir Politik Indonesia 1965-1998)*, Jakarta: Jakarta: Kompas, 2014. Hlm. 59.

⁸¹Tempo, *Sarwo Edhie dan misteri 1965*, Jakarta: KPG, 2013. Hlm. 9.

sunyi, ditinggalkan oleh penjaga dan mahasiswanya. Di mulut jalan Menteng Raya menuju ke Medan Merdeka Timur ditutup untuk umum. Pasukan cakrahirawa dalam keadaan siaga tempur bertahan di Istana. Situasi kota Jakarta sangat mencekam, sewaktu-waktu bisa pecah insiden dan pertumpahan darah.⁸²

Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) adalah sebuah peralihankekuasaan yang drastis, tetapi sebenarnya terjadi dari sejumlah perwira yang kebetulan. Setelah KAMI dibubarkan pada 25 Februari 1966, aliansi dengan kelompok Muslim semakin kuat. Barisan antikomunis di bawah pimpinan Muslim dan Katolik bukanlah sesuatu yang baru. Pada era demokrasi terpimpin antara tahun 1950 dan 1957, Masyumi dan partai Katolik pernah bergabung dalam satu pemerintahan koalisi, bersatu sebagai kekuatan oposisi. Pada tahun-tahun itu, pimpinan Masyumi bersikap lugas dan setia memperjuangkan kepentingan bangsa tanpa ada kepentingan tambahan yang khusus untuk Islam. Karena itu, mereka dapat bekerja sama dengan baik.

Kedekatan hubungan di antara kedua kelompok ini pudar di konstituante yang mengalami kebuntuan pada tahun 1957-1959 karena perbedaan prinsip tentang dasar Negara. Partai-partai muslim, dengan kekuatan 43 persen di konstituante, menginginkan Islam sebagai dasar Negara dan selebihnya menginginkan pancasila. Pecahnya kerja sama itu juga karena Soekarno memenjarakan beberapa pemimpin Masyumi setelah pemberontakan mereka di Sumatera dan Sulawesi antara tahun 1958 dan 1960 dikalahkan. Namun, ketika ancaman komunisme

⁸²Ananta Toer, *Memoar Oei Tjoe Tat pembantu Presiden Soekarno*, Jakarta: Hasta Mitra, 1998. Hlm. 204

meningkat pada akhir tahun 1950-an, para pemimpin Muslim dan Katolik kembali bergabung.

Persatuan ini tidak berlangsung lama. Pada sidang umum MPRS 1968, sebagian besar pemimpin Muslim yang duduk dikelompok kerja, dengan dukungan para Jenderal yang berhaluan kanan dalam *spectrum* politik nasional, menuntut agar ada bagian-bagian syariah dimasukkan ke dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan dalam tafsir UUD 1945. Partai Katolik tidak menerima gagasan tersebut, dan bergabung dengan kelompok nasionalis dan Angkatan Darat untuk menolak dokumen-dokumen yang disiapkan oleh kelompok kerja. Prinsip dan politik menyulitkan untuk mempertahankan aliansi ini. Gerakan menuntut pembubaran PKI ketika itu difokuskan pada sejumlah menteri tertentu yang berhaluan kiri.⁸³

Ketika Presiden berpidato, sidang baru berlangsung. Amir Machmud menerima nota dari Jenderal Sabur meminta agar keluar dari ruangan sidang kabinet, karena diluar ada pasukan pasukan tanpa tanda pengenal. Presiden diantar oleh Amir Machmud dan didampingi oleh Sabur dan Mangil menuju helikopter yang diparkirkan di depan istana. Presiden dikawal oleh Sabur dan Mangil, masuk ke dalam helikopter dan terbang menuju ke utara untuk menghindari kemungkinan ditembak oleh pasukan tanpa identitas. Soekarno segera melarikan diri ke istana Bogor dengan helikopter.⁸⁴ Amir Machmud, Mayjen Basuki Rachmad dan M. Jusuf menyusul keistana untuk melihat keadaan Presiden Soekarno, namun sebelumnya mereka menemui Mayjen Soeharto untuk melaporkan situasi sidang

⁸³Delier Noer, . *Bunga Rampai Dari Negeri Kanguru Kumpulan Karangan*, hlm. 66

⁸⁴Djamhari, A. Saleh, *Sejarah Surat Perintah 11 Maret 1966*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1986. Hlm 43.

kabinet. Setelah melaporkan situasi sidang kabinet, mereka minta izin kepada Soeharto untuk menghadap Presiden Soekarno di Bogor. Soeharto mengizinkan mereka pergi dan menitipkan pesan kepada Presiden Soekarno. Pesan Jenderal Soeharto adalah “agar Presiden Soekarno memberikan kepercayaan kepada Soeharto untuk mengatasi keadaan. Tidak ada perintah lain”.

Kedatang ketiga perwira tinggi itu di Bogor disambut oleh Jenderal Mangil, dan diantar untuk bertemu Soekarno. Pada kesempatan itu Basuki Rachmad sebagai perwira yang senior, menyampaikan maksud kedatangannya dan menyampaikan pesan dari Jenderal Soeharto, agar Presiden Soekarno memberikan kepercayaan kepadanya untuk mengatasi keadaan. Kemudian mereka mengadakan pembicaraan dengan serius. Pada saat akan merumuskan draf surat perintah, Amir Machmud menyarankan agar dibentuk tim yang diketuai oleh Basuki Rachmad dan Sabur sebagai Sekretaris.

Melihat alur keterangan di atas, jauh sebelum kekuasaan Soekarno dicabut, sudah dapat diduga dan disimpulkan bahwa suatu saat Soekarno mau tidak mau akan lengser. Ia pun tahu akan hal ini, apalagi setelah Nawaksara dan pelengkap Nawaksara tidak dapat diterima oleh MPRS. Itulah sebabnya Soekarno segera menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada Soeharto dalam bentuk pengumuman Presiden 20 Februari 1966. Sebelumnya sudah ada dua instrumen yang dapat menghantar Soeharto untuk menggantikan Soekarno. Kedua instrument itu adalah Serat Perintah Sebelas Maret dan TAP MPRS No. IX tahun

1966, yang statunya adalah sebagai peningkatan dan pengukuhan Surat Perintah Sebelas Maret.⁸⁵

Dengan kondisi seperti itulah Surat Perinta 11 Maret 1966 lahir dan menjadi landasan resmi yang cukup kuat untuk mengambil langkah-langkah strategis yang cukup diperlukan. Dengan Supersemar secara berangsur-angsur dualisme antara militer dan istana dalam hal pengembalian penyenggaraan Negara bisa perlahan-lahan dikembalikan kepada lembaga pemegang kedaulatan rakyat, yakni MPRS. Pada tengah malam tanggal 11 Maret 1966, di Kostrad dilakukan pembicaraan pertama mengenai Supersemar. Pagi harinya Jenderal Soetjipto datang kerumah Nasution, sebelum rapat dimulai Soeharto meminta Jenderal Setjipto untuk membacanya. Nasution mengatakan tentang perlunya kekuasaan yang diberikan lewat Supersemar sepenuhnya digunakan Soeharto untuk secara *de facto* memegang kekuasaan pemerintahan.⁸⁶

Dari uraian diatas ditegaskan bahwa setelah terjadinya tragedi 30 September 1965, kepercayaan rakyat terhadap Presiden Soekarno telah berkurang, keinginan-keinginan rakyat tidak diperdulikan oleh Soekarno, sehingga menjadikan rakyat dan para pelajar melakukan demonstrasi guna melakukan tuntutan mereka. Situasi semakin parah dan susah dikendalikan, sehingga memaksa Soekarno untuk memberikan surat perintah kepada Soeharto untuk mengendalikan situasi politik khususnya di ibu kota. Dengan surat perintah tersebut menghantarkan Soeharto menjadi kepala pemerintahan dan selanjutnya diangkat menjadi Presiden menggantikan Presiden Soekarno.

⁸⁵*Ibid, hlm 202.*

⁸⁶Tim PDAT, *Jenderal Tanpa Pasukan, Politisi Tanpa Partai (perjalanan Hidup A.H. Nasution)*, Jakarta: PT. Temprint. Tahun. 1998. Hlm. 159.

D. Pengangkatan Soeharto Menjadi Presiden

Kepiawaian Soeharto dalam menumpas habis PKI telah memberinya peluang dan kepercayaan besar bagi rakyat Indonesia, keberhasilan Soeharto telah membawa kepercayaan rakyat terhadap tokoh baru tersebut, yang pada saatnya menjadikan dirinya menjadi Presiden kedua Indonesia. Tarik menarik antara Soekarno, militer, dan PKI pada era demokrasi terpimpin mencapai puncaknya pada pada bulan September 1965, menyusul kudeta PKI yang kemudian dikenal sebagai G30 S/PKI. Setelah kudeta yang gagal tersebut kekuatan Soekarno dan PKI merosot tajam sehingga tarik menarik kekuasaan antara kekuatan politik era Orde Lama menjadi tidakimbang lagi dan berakhir dengan tampilnya Angkatan Darat sebagai pemenang. Merosotnya kekuatan Soekarno dan PKI secara drastis setelah G30S/PKI, disebabkan oleh peran-peran yang dimainkan oleh keduanya sebelum kudeta itu.⁸⁷ Krisis politik yang cukup berat itu ditandai oleh berbagai demonstrasi mahasiswa, pelajar, ormas-ormas *onderbouw* parpol-parpol yang lemah pada zaman demokrasi terpimpin yang semuanya di dukung oleh Angkatan Darat. Akhirnya Soekarno mengeluarkan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) 1966 yang ditujukan kepada Soeharto.⁸⁸

Menjelang pertengahan tahun 1966 muncul perkembangan yang sangat berarti menyangkut upaya menghadapi kekuasaan Soekarno. Waktu itu kesatuan-kesatuan aksi telah berbulan-bulan melancarkan demonstrasi dengan dukungan pihak militer. Sementara, latar belakang peristiwa G 30S/PKI makin terbuka setelah berlangsung sidang-sidang di pengadilan atas jumlah pejabat yang terlibat.

⁸⁷Mohtar Mas' oed, *Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966-1977*, Jakarta: LP3ES. 1989. thn. 47.

⁸⁸Rosihan Anwar, *Dua kali diberendel*, Tanpa Pnerbit. Thn 1992. Hlm 67.

Semua peristiwa itu membuat arus yang menentang Presiden Soekarno semakin kencang.

Setelah satu tonggak perkembangan penting adalah munculnya pernyataan 5 Mei 1966. Nasution yang menjabat sebagai Wakil Panglima Besar (Wapangsar) ikut menandatangani pernyataan ABRI. Penandatanganan lainnya adalah Letjen Soeharto sebagai Waperdam Hankam sekaligus pangad, Panglima AL Muljadi, Panglima AU Roesmin Nurjamin dan Kepala Polisi Jenderal Sutjipto Judodiharjo. Pokok dari pernyataan tersebut adalah menuntut lembaga-lembaga tinggi dan tertinggi Negara seperti MPR, Presiden, DPR, DPA, Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan dan lain-lain agar kembali ke tempat dan fungsinya sesuai UUD 1945.⁸⁹

Seperti diketahui, selama itu lembaga-lembaga tinggi tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Sebab, dengan kedudukannya sebagai Panglima Besar Revolusi (PBR), Presiden Soekarno bisa menjadikan semua lembaga yang mestinya mengawasi dirinya itu, terbalik menjadi di bawah kendalinya. Jelas, untuk itu yang harus dilakukan adalah menggelar Sidang Umum MPRS. Datangnya pernyataan tersebut ibarat “gong” bagi tuntutan-tuntutan kesatuan aksi sebelumnya. Kalangan kesatuan aksi juga segera memberikan dukungan. Menurut A.H. Nasution ia melihat bahwa pernyataan tersebut mempunyai arti yang sama pentingnya dengan Tritura 10 Januari 1966. Kalau Tritura adalah pencetus tuntutan hati Nurani Rakyat, pernyataan 5 Mei dipandang sebagai penataan

⁸⁹Tim PDAT, *Jenderal Tanpa Pasukan Politisi Tanpa Partai*, Jakarta: Tamprint. Thn. 2002. Hlm.205.

perjuangan. Dampak pernyataan 5 Mei yang paling nyata adalah melunaknya sikap Presiden.

Setelah A.H Nasution diangkat menjadi ketua MPRS, Nasution mempunyai posisi konstitusional yang kuat untuk melancarkan perubahan-perubahan. Perubahan yang dilakukan oleh Nasution adalah sidang I, II, III dan IV, Sidang Umum IV yang berlangsung secara marathon dan makan waktu dua minggu lebih itu akhirnya menghasilkan 24 ketetapan (Tap IX sampai XXXII), sebuah keputusan (Keputusan No 5/MPRS/1966), dan sebuah resolusi tentang pembinaan kesatuan dan persatuan bangsa.⁹⁰

Di antara Tap yang penting dalam hubungannya dengan penyelesaian situasi saat itu adalah Tap IX tentang kelanjutan dan perluasan penggunaan Supersemar, Tap XII tentang penyusunan Kabinet Ampera, Tap XV tentang siapa yang mengganti Presiden jika Presiden berhalangan atau tidak bisa menjalankan tugas. Tap XXV tentang pembubaran PKI Leninisme, sampai Tap XXXII tentang pembinaan pers.

Keputusan MPRS Nomor 5 juga merupakan hal yang penting. Bahkan mendesak karena menyangkut pertanggung jawaban Presiden. Keputusan ini menyatakan bahwa pidato pertanggungjawaban Presiden Soekarno yang dikenal dengan sebutan *nawaksara* (Nawa=Sembilan, aksara=huruf, pidato Presiden Soekarno terdiri atas Sembilan pokok pikiran) ternyata tidak memuaskan Majelis. Melalui keputusan Nomor 5 MPRS mengharuskan untuk melengkapi pertanggungjawabannya. Khususnya yang berhubungan dengan sebab terjadinya

⁹⁰A.H. Nasution, *Memenuhi Panggilan Tugas (jilid 8)*, Jakarta: CV. Haji Masagung, 1988. Hlm. 9

Peristiwa G30S/PKI dan epilognya, kemunduran ekonomi dan kemunduran “akhlak.” Inilah pertama kalinya seorang Presiden diminta pertanggungjawaban dalam masa baktinya dan itu merupakan suatu langkah yang penting”.⁹¹

Dalam perkembangan selanjutnya, beberapa kekuatan yang anti PKI membuat suatu kesepakatan bersama membentuk KAP-Gestapu (Kesatuan Aksi Pengganyangan Gestapu), yang kemudian menjadi Front Pancasila dengan dukungan dari wakil NU, Muhammadiyah, PSII, Perti, Katolik, IPKI, Parkindo, Soski Sekber Golkar, Gemuis, KBKI dan Gasbinda.⁹² Aksi KAP-Gestapu di bawah pimpinan Subchan, ZE (NU) semakin hari semakin keras dan meluas dalam menuntut pelarangan partai dan ormas yang terlibat G30S/PKI serta membersihkan perangkat-perangkat pemerintah dari unsur komunis. Gerakan ini juga menyerukan kepada seluruh kaum muslimin agar mendukung ABRI untuk memulihkan ketentraman umum. Maka dibawah komando Mayor Jenderal Soeharto (panglima KOSTRAD), ABRI mengambil langkah-langkah pemulihan keamanan.

Tuntutan terhadap pembubaran PKI beserta ormas-ormasnya semakin tidak dapat dibendung. Seluruh kekuatan anak bangsa baik dari kalangan pelajar, pemuda dan mahasiswa telah merapatkan barisan dan menuntut apa yang mereka sebut sebagai TRITURA atau Tri Tuntutan Rakyat, yakni bubzxzx arkan PKI, rombak kabinet dwi kora dan turunkan harga.⁹³ Ironisnya tuntutan tersebut tidak

⁹¹A.H. Nasution, *Memenuhi panggilan Tugas(jilid 7)*, Jakarta: CV. Haji Masagung, 1988. Hlm. 162-164.

⁹²Yusuf Abdulah Puar, *Perjuangan dan Pengabdian Muhammadiyah*, Jakarta: Pustaka Panjimas. 1989. Hlm. 305.

⁹³Yozar Anwar, *Angkatan 66 sebuah catatan harian Mahasiswa*, Jakarta: Sinar Harapan. 1981. 11.

mendapat respon dari presiden Soekarno sebagaimana yang mereka harapkan. Bahkan Presiden Soekarnoterkesan sama sekali tidak bimbang dengan aksi-aksi tersebut. Akibatnya, aksi-aksi anti Soekarno pun bertambah memuncak. Maka kepercayaan kekuatan penentang Soekarno semakin menghebat. Kondisi ini memaksa Presiden pertama Republik Indonesia (RI) tersebut untuk melepaskan semua kekuasaannya. Lahirlah Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret) dari Soekarno ke Jenderal Soeharto. Berdasarkan itu, pemegang mandat Supersemar membubarkan PKI sebagai partai terlarang di seluruh pelosik tanah air.

Surat perintah tersebut telah menjadi alat legitimasi yang sangat efektif bagi Angkatan Darat untuk melangkah lebih jauh dalam panggung politik. Sehari setelah surat perintah tersebut keluar itu diterima, Soeharto membubarkan PKI, sesuatu yang sudah lama dituntut oleh masyarakat melalui demonstrasi-demonstrasi. Dengan pembubaran itu, maka habislah permainan PKI sebagai partai dari peta politik di Indonesia sehingga tidak ada lagi ancaman manifes dari partai ini. Setelah PKI dibubarkan, tiba gilirannya pengambilan tindakan terhadap tokoh-tokoh PKI dan pendukung Soekarno dari berbagai lembaga. Pengumuman presiden yang ditandatangani Letjen Soeharto pada tanggal 18 Maret 1966, berisi pengamanan terhadap beberapa menteri Kabinet Dwikora yang dianggap ada indikasi terlibat dala G30S/PKI. Disamping dilakukan terhadap orang-orang pendukung PKI atau Soekarno di kabinet, penindakan itu dilakukan pula terhadap mereka yaang ada di birokrasi, ABRI, dan DPR.⁹⁴

⁹⁴Joeniarto, *Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara. Thn. 1990. Hlm. 140.

Presiden Soekarno sendiri praktis kehilangan kekuasaannya setelah mengeluarkan Supersemar, kendati secara resmi masih menjabat sebagai presiden dalam status “presiden konstitusional”. Setelah PKI dibubarkan Soekarno kehilangan pendukung yang selama ini diandalkan, tetapi ia masih belum mau menyerah, dan mencoba menggerakkan para pendukungnya dari kalangan Angkatan Laut dan PNI untuk menentang pemerintahan Soeharto sehingga sempat menimbulkan perang kecil-kecilan. Tetapi Angkatan Darat yang dipimpin oleh Soeharto dengan cermat, hati-hati, namun tegas berhasil mengatasi itu semua.⁹⁵ Setelah dibersihkan dari unsur PKI dan pendukung Soekarno, DPR-GR dan MPRS mulai mengadakan sidang-sidangnya sebagai lembaga negara. Pada bulan Juni 1966 DPR-GR mengeluarkan sebuah *memorandum* yang memuat usul tentang Sumber Tertib Hukum, Tata Urutan Perundang-undangan, dan skema susunan kekuasaan UUD 1945. Memorandum ini, khusus mengenai sumber tertib hukum dan tata urutan perundang-undangan, diterima dalam sidang Umum MPRS IV yang berlangsung Juli 1966 dan dijadikan lampiran otentik ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966. Dengan diterimanya memorandum ini, maka kedudukan Soeharto sebagai tokoh utama dalam pemerintahan semakin kuat karena dalam memorandum itu disebutkan Supersemar sebagai dasar hukum bagi lahirnya pemerintahan Orde Baru dibawah pimpinan Soeharto. Apalagi acara khusus dalam Sidang Umum telah dikeluarkan

⁹⁵A.H. Nasution, *Memenuhi Panggilan Tugas*, hlm 53.

pula ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966 yang menguatkan Supersemar sebagai landasan berpijak bagi beroperasinya pemerintahan Orde Baru.⁹⁶

Pada tahun 1967, setelah menganggap Soekarno tidak dapat mempertanggungjawabkan “tragedi nasional” MPRS mencabut mandat Soekarno sebagai presiden. Soekarno kehilangan jabatannya berdasarkan TAP. No XXXIII/MPRS/1967, yang sekaligus menjadikan Soeharto sebagai pejabat presiden. Setahun kemudian melalui TAP No. XLIII/MPRS/1968 Soeharto diangkat menjadi presiden definitif. Demikianlah, G30S/PKI telah mengantarkan Angkatan Darat, yang dipimpin oleh Soeharto untuk tampil di pentas politik Indonesia secara lebih *legitimated*. Kekuatan dan peran politik Soekarno dan PKI, yang dulu menjadi saingan Angkatan Darat, berakhir sama sekali sejak tampilnya Soeharto mengambil *over* atas mandat kekuasaan pemerintahan dari tangan Soekarno. Selanjutnya era demokrasi dipimpin yang didominasi oleh Soekarno (dengan saingan dari PKI dan AD) disebut sebagai era Orde Lama yang dilawankan dengan era setelah tampilnya Soeharto sebagai pucuk pimpinan nasional yang disebut Orde Baru.⁹⁷

Dari penjelasan di atas ditegaskan bahwa tragedi 30 September dan ketidakmampuan Soekarno dalam menyelesaikan permasalahan politik dan tidak bisa memberi pertanggungjawaban atas kejadian radikal PKI telah mengantarkannya kepada akhir pemerintahannya menjadi Presiden. Dengan bekal Supersemar dan kepercayaan rakyat terhadap Soeharto yang mampu mengkonduksikan situasi politik, melalui sidang Istimewa MPRS telah menetapkan Soeharto menjadi

⁹⁶Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers. Thun. 201. Hlm. 198.

⁹⁷*Ibid.* Hlm. 198.

Presiden kedua menggantikan Soekarno. Sejak saat itulah telah berganti dari rezim Orde Lama menjadi Rezim orde Baru.

BAB V

SIMPULAN

A. Kesimpulan

- 1 Penyebab munculnya pemerintahan Orde Baru diawali dengan kondisi politik di Indonesia yang tidak stabil, dikarenakan ada pemberontakan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI). Gagalnya pemberontakan pada 30 September telah memunculkan tokoh baru yaitu Soeharto.
- 2 Pemberontakan 30 September 1965 telah membuat kekacauan, sehingga Soekarno memberikan mandat melalui Surat Perintah Sebelas Maret kepada Soeharto untuk mengambil alih segala tindakan yang berhubungan dengan keamanan negara. Melalui Surat Perintah tersebut secara tidak langsung telah terjadi peralihan kekuasaan.
- 3 Pada tahun 1967 semua pertanggungjawaban Soekarno ditolak oleh MPRS, kemudian melalui sidang istimewa MPRS mengangkat secara resmi Soeharto menjadi Presiden kedua Republik Indonesia.
- 4 Setelah Soeharto menjadi Presiden, Ia bekerjasama dengan ABRI dengan menjadikan ABRI sebagai koalisi politiknya, dan ABRI di fungsikan sebagai militer dan juga ikut serta dalam perpolitikan.

- 5 Presiden juga memberikan kebijakan penyederhanaan partai politik menjadi tiga, yaitu; Partai Demokrasi Indonesia (PDI), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Golongan Karya (Golkar)
- 6 Dampak dari kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah Orde Baru adalah, menurunnya jumlah suara partai Islam pada pemilu semasa pemerintahan Soeharto.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas mengenai “ *Kebijakan Politik Orde Baru terhadap Politik islam di Indonesia tahun 1966-1990*” untuk itu penulis akan memberikan saran-saran sebagai berikut:

- 1 Awal munculnya Orde Baru disebabkan terjadinya Gerakan 30 September 1965 karena para elit partai mempunyai ideologi yang berbeda, sehingga masing-masing partai menginginkan perubahan ideologi yang memunculkan terjadinya konflik nasional. Dengan demikian saran penulis, setelah memahami perjalanan sejarah Orde Baru maka diharapkan bagi pemerintah harus mengawal bagi setiap organisasi agar tidak melakukan tindakan yang memecah belahpersatuan dan kesatuan Republik Indonesia.
- 2 Pada dasarnya pemerintahan Orde Baru sangat mendukung pembangunan ekonomi nasional. Namun yang di sayangkan adalah kebijakannya dalam membuat kebijakan penyederhanaan partai-parti politik dan membatasi gerak partai-partai pesaingnya sehingga perjalanan demokrasi tidak berjalan sesuai dengan fitrahnya. Dengan demikian saran penulis bagi

pemerintah, tujuan untuk membangun bangsa sangat di dukung, namun demokrasi harus tetap berjalan, banyaknya partai sekarang ini menunjukkan bahwa semua elemen partai mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk mensejahterakan bangsa, oleh karena itu di perlukan kebebasan selama masih dalam ketentuan hukum dan tidak memunculkan konflik perpecahan.

- 3 Pada era Orde Baru Politik Islam diberlakukan secara “khusus” supaya tidak berkembang dan tidak mendapat simpati dari para pendukungnya, hal itu karena pemerintah memandang politik Islam sebagai “penghalang” bagi Pemerintah. Oleh sebab itu politik Islam dibatasi sehingga ketika pada pemilihan umum partai Islam kurang mendapat dukungan dari orang-orang Islam. Dengan demikian penulis memberikan saran kepada pemerintah, bahwa politik Islam yang sekarang tidak perlu lagi dibatasi perannya, karena Politik Islam mempunyai hak yang sama dengan organisasi-organisasi yang lain dan mempunyai tujuan yang sama untuk memajukan bangsa.

C. Rekomendasi

Berdasarkan apa yang sudah diuraikan pada bab-bab sebelumnya yaitu mengenai “*Kebijakan Politik Orde Baru terhadap Politik Islam di Indonesia tahun 1966-1990*”, untuk itu penulis memberikan rekomendasi atas hasil penelitian ini. Kepada semua pembaca dan peneliti, untuk melanjutkan lagi penelitian ini lebih dalam lagi mengenai Kebijakan politik pada masa Orde Baru terutama mengenai keterkaitan ABRI dan pemerintah Orde Baru dalam

kebijakannya terhadap politik Islam. Tidak kalah menariknya lagi yaitu mengenai kelanjutan hubungan Pemerintah Orde baru dengan Umat Islam dalam bidang politik, dan keagamaan. Hubungan keagamaan yang dimaksud adalah Politik Islam, karena tidak menutup kemungkinan lemahnya Islam secara politik merupakan hasil dari penekanan pemerintah. Semua hasil penelitian tersebut akan dapat dibuktikan dengan temuan-temuan fakta dan data baru sehingga menghasilkan penelitian yang baru juga. Oleh sebab itu, pada penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, dan penelitian ini juga bukanlah penelitian yang final.

REFERENSI

Abdillah, Masykuri. *Islam dan Dinamika Sosial Politik di Indonesia*, Jakarta:

Gramedia Pustaka Utama. 2011.

Abdullah, Taufik. Dkk. *Malam Bencana 1965 dalam Belitan Krisis Nasional*,

Jakarta: Yayasan Pusaka Ober Indonesia, 2013.

Abdulah Puar, Yusuf. *Perjuangan dan Pengabdian Muhammadiyah*, Jakarta:

Pustaka Panjimas. 1989.

MAhfud, Moh. *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press. Thun. 2001.

Al-Chaidar, *Reformasi Prematur Jawaban Islam Terhadap Reformasi Total*,

Jakarta: Darul falah. 1999.

Aminuddin, *Kekuatan Islam dan Pergulatan Kekuasaan Islam di Indonesia;*

sebelum dan sesudah runtuhnya Rezim Soeharto, Yogyakarta:

Pustaka Pelajar, 1999.

Anderson, Benedict.,*Jelajah Budaya-budaya Politik di Indonesia*,

Yogyakarta:Mata Bangsa, 1990.

Anderson, James E. *Public policy making*, Cetakan ke-3. New York: Holt,

Rinehart and Winston. 1984.

Anwar, Rosihan. *Dua Kali diberendel*, Tanpa Penerbit. Thn 1992.

Anwar, M. Syafi'i, *Jurnal Membaca Politik Akomodasi Islam dan Negara dalam Orde Baru*, Bina darma 12:46 : Palembang, 1994.

Ananta Toer, *Memoar Oei Tjoe Tat Pembantu Presiden Soekarno*, Jakarta: Hasta Mitra, 1998.

Anwar, Yozar . *Angkatan 66 Sebuah Catatan Harian Mahasiswa*, Jakarta: Sinar Harapan. 1981.

Anwar, Syafi'i. *ICMI: Kelahiran dan Misi*. Jakarta: Departemen Pembinaan Sumber Daya Manusia ICMI, 1994.

----- . *Pemikiran dan Aksi Islam Politik "Sebuah Kajian Politik Tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru"*, Jakarta: Paramadina. 1995.

Asshidiqie, Jimly. *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.

Azis Thaba, Abdul. *Islam dan Negara (dalam politik Orde Baru)*, Jakarta: Gema Insani Press. 1996.

Badudu-Zain. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama, 1996.

Boland, B.J., *Pergumulan islam di Indonesia*, Jakarta: PT Grafit, 1985.

Bourcher David, *Pemikiran Sosial dan Politik Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. 2006.

Bourchier, David. dan Vedi R. Hadi, *Pemikiran Sosial dan Politik Indonesia (1965-1999)*, Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti. 2003.

Carter, Afril. *Otoritas dan Demokrasi*, Terjemahan. Sahat Simamora. Jakarta: Rajawali Press. 1985.

Crouch, Harnold. *Militer dan Politik di Indonesia*, Jakarta: Sinar Harapan, 1986.

Dahl, Robert A. *Dilema Demokrasi: Antara Otonomi dan Kontrol*, terjemahan Sahat Simamora. Jakarta: Rajawali Press. 1985.

Dahm, Benard, *Soekarno and the Struggles For Indonesian Political Thinking 1945-1965*, London University Press, 1979.

Dalima, A. *Metode Penelitian Sejarah*. Yogyakarta: Ombak. 2012.

Djamhari, A. Saleh, *Sejarah Surat Perintah 11 Maret 1966*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1986.

Duverger, Maurice. *Sosiologi Politik*. Jakarta: Rajawali, 2002.

Gafar, Alfian. *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2001.

Hamdan, Zoelava. *Pemakzulan Presiden di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.

- Haris, Samsuddin. *Menggugat Pemilihan umum Orde Baru Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2008.
- . *Pemilu-pemilu orde baru*. Jakarta: Gramedia. 1997.
- Hefner, Robert., *Islam dan Demokratis di Indonesia*. Jakarta: ISAI, 2001.
- Huda, Nor. *Islam Nusantara: sejarah sosial Intelektual Islam di Nusantara*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2007.
- Hutington, *Tujuan dan Pilihan Partisipasi Politik dalam Konteks Pembangunan* Yogyakarta: Gajah Mada University Pres. 1980.
- Hornby, AS. *Oxford Advanted Learner's Dictionary of Current English*, (Oxford: Oxford University press. 1995.
- Iqbal, Muhammad. *Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Kenana Prenada Media Group. 2010.
- Ismail, Faisal . *Idiologi Hegemoni dan Otoritas Agama*, Yogyakarta: Tiara Wacana. 1999.
- Sitompul, Einar *Nahdatul Ulama dan Pancasila*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 1991.
- Kaiseipo, Manuel. *Dilema Partai Demokrasi Indonesia (perjuangan mencari Identitas)*, Jakarta:Prisma,1981.

Kamil, Sukron. *Pemikiran politik: Agama, dan Negara, Demokrasi, Civil Society, Syariah dan Ham, Fundamentalisme, dan Anti Korupsi*. Jakarta: Prenada Media Group. 2013.

Karim, Rusli. *Negara dan Peminggiran Islam Politik*, Yogyakarta: Tiara Wacana. 1999.

------. *Perjalanan Partai Politik di Indonesia (Sebuah Potret Pasang Surut)*, Jakarta: Rajawali Press. 1983.

Liddle, Wiliam . *Pemiu-Pemilu Orde Baru: Pasang Surut Kekuasaan Politik*. Jakarta: LP3ES.

Maarif, Syafi'i . *Islam dan Politik (Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin 1959-1965)*, Jakarta: Gema Insani Press. 1996.

------. *Islam Kekuatan Doktrin dan Keagamaan Umat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.

------, *Nahdatul Ulama; Ideologi Garis Politik dan Cita-cita Pembentukan Umat*, Jakarta: Lembaga Pendidikan Ma'arif, 2004.

------, *Islam dan Naskah Kenegaraan*, Jakarta:LP3ES, 1985.

Madjid, Nurcholis. *Islam Kemordenan dan Keindonesiaan*. Bandung: Mizan. 1986.

Mahfud, Moh. *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

------. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: LP3S. 1998.

Makka, Makmur. dan Dhurorudin Mashad, *ICMI: Dinamika Politik Islam di Indonesia*. Jakarta:Pustaka CIDESINDO.1996.

-----, Makmur. *ICMI (Dalam Sorotan Pers Desember 1990-1991)*, Jakarta: Seketariat Bersama ICMI. 1991.

Mas' oed, Mohtar . *Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966-1977*, Jakarta: LP3ES. 1989.

Moertopo, Ali. *Strategi Politik Nasional*, Jakarta: CIS. Tahun 2013.

Munir Mulkhan, Abdul. *Perubahan Perilaku Politik dan Polarisasi Umat Islam 1965-1987*, Jakarta: Rajawali,1989.

Muhajir, Neng, *Metode Penelitian Sejarah*. Jakarta: Rineke Cipta. 1994.

Muchtar ghazali, Adeng *Perjalanan Politik Umat Islam Dalam Lintasan Sejarah*, Bandung: Pustaka Setia. 2004.

Nasution, *Memenuhi Panggilan Tugas (jilid 8)*, Jakarta: CV. Haji Masagung, 1988.

-----, *Memenuhi panggilan Tugas(jilid 7)*, Jakarta: CV. Haji Masagung, 1988.

-----, *Menuju Tentara Rakyat*, Jakarta: Yayasan Minang, 1963

-----, Amran, dkk., *Setelah Boom Sarjana Islam*, Jakarta: Tempo, 1991.

Natsir, Mohammad, *Agama dan Negara dalam Perspektik Islam*. Jakarta.

DDII.2001.

Nafis, Muhammad Wahyu. *CakNur Sang Guru Bangsa Biografi, pemikiran*

Prof. Dr. Nurcholis Madjid, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.

2014.

Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia. 2005

Noer, Delier. *Bunga Rampai Dari Negeri Kanguru Kumpulan Karangan*, Jakarta:

Panji Masyarakat.

----- . *Mohammad Hatta Biografi Politik*. Jakarta: LP3ES. 1990.

Nugroho, Taufiq. *Pasang Surut Hubungan Islam dan Negara Pancasila*.

Yogyakarta: Pad ma. 2003.

Oeniarto, *Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara.

1999.

O'Leary, Brenden , *Ilmu Politik, ed. Ensiklopdi Ilmu-ilmu Sosial*, diterjemahkan Haris

Munandar dkk. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Rahardjo, Dawam *Intelektual Inteligensia dan Prilaku Politik Bangsa: Risalah*

cendikiawan Muslim, Bandung: Mizan. 1991.

Rusli, Budiman, *Kebijakan Publik Membangun Pelayanan Publik yang Responsif*,

Bandung: Hakim Publishing, 2013

- Rocamora, J. Eliseo. *Nasionalisme Mencari Ideologi*, Jakarta: graffiti, 1991.
- Roem, Muhammad, *Pelajaran dari Sejarah*, Surabaya: Dokumentasi, 1970.
- Said, Salim. *Genesis of General Soedirman and the Indonesian Military in Politics 1945-49*, (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies and Heng Mui Keng Terrace)
- Saidi, Ridwan. *PPP dan Politik Orde Baru*, Jakarta: Gramedia, 1991.
- Salim, Said. *Tumbuh dan Tumbuhnya Dwifungsi ABRI: Perkembangan Pemikiran Politik Militer Indonesia 1958-2000*. Jakarta: Aksara Karunia. 2002.
- Samson, Allan. *Army and Islam in Indonesia*. Tanpa Penerbit. 1972.
- Samsudin, *Mengapa G30S/PKI gagal*, Jakarta: Obor. 2005.
- Samego, Indra. *Bila ABRI Menghendaki Desakan Kuat Reformasi atas Konsep Dwifungsi ABRI*. Bandung: Mizan. 1998.
- Sanit, Arbi. *Sistem politik Indonesia*, Jakarta: Rajawali. 1981.
- Santoso, Amir. *Demokrasi dan nilai-nilai Politik*, Jakarta: Gramedi. 1991.
- Sartori. *Memantau Pemilu Mendorong Demokrasi*. Jawa Timur: Percetakan Ubaya. 2000.
- Siddiq, Dja'far. *PPP Menggagas Reformasi membangun Indonesia Baru*, (Tanpa kota nama penerbit, 2003).

- Singh, Bilveer. *Dwi Fungsi ABRI*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 1996.
- Soeharto, *Amanat Kenegaraan IV 1982-1985*. Jakarta: Inti Idayu Press. 1987.
- Soetrino, Loekman. *Pemilu 1982; Suatu evaluasi*, Kompas 24 Mei 1982.
- Soekanto, Sarjono, *Kamus Sosiologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, thn 1993.
- Soekarno, *Dibawah Bendera Revolusi*, Jakarta: Dibawah Bendera Revolusi, 1963.
- Sunanto, Musyriyah, *Sejarah Peradaban Islam Indonesia*, Jakarta:raja Grafindo Persada. 2012.
- Suntana, Ija, *kapita Selekta politik Islam*, Bandung: Pustaka setia.2010.
- Sulastomo, *Hari-Hari yang panjang 1963-1966*, Jakarta:Masagung, 1990.
- Suhadi.,*Kontestasi Islam-Kristen Paska Institutionalisi Agama-agama di Indonesia*, Jakarta:Raja Grafindo, 2005.
- Suharsimi, Arikunto. *Prosedur penelitian suatu pendekatan Praktek*, Edisi Revisi. Jakarta: Rineke Cipta. 1988.
- Suyitno, *Matahari Terbit Bintang Sembilan*, (Tanpa nama kota): Gama Media, terbitan kedua 2012.
- Syarbaini, Syahrial. Dkk. *Sosiologi dan Politik*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2002.
- Syabirin, Tabrani. *Menjinakkan Islam strategi Politik Orde Baru*, Jakarta: Teras. 2014
- Syamsudin, Din . *Islam dan Politik Era Orde Baru*, Jakarta: Logos, 2001.

Tempo, *Sarwo Edhie dan Misteri 1965*, Jakarta: KPG, 2013.

Thaba, Abdul azis. *Islam dan Negara dalam politik Orde baru*. Jakarta: Gema
InsaniPress. 1996.

Thoha, Miftah *Birokrasi dan Politik di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
2014.

Thaha, Idris. *Pergulatan Partai Politik di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo
Persada. 2004

Tim PDAT, *Jenderal Tanpa Pasukan, Politisi Tanpa Partai (perjalanan Hidup
A.H. Nasution)*, Jakarta: PT. Temprint. Tahun. 1998.

Tjokroaminoto, Moeljrato. *Pemilu 1982; Suatu Retropeksi*. Kompas. 19 Mei
1982.

Pakpahan, Muchtar . *DPR RI SEMASA ORDE BARU*. Jakarta: Pustaka Sinar
harapan. 1994.

Pamungkas, Sigit. *Perihal Pemilu*. Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu
Pemerintahan UGM. 2009.

Poerwantana, *Partai Politik Di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta. 1994.

Victor, M. fik *Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi Tentang Konpirasi*, Jakarta:
Yayasan Obor. 2005.

Wahid, Abdurrahman. Dkk, *Kontroversi Pemikiran Islam di Indonesia*, Bandung:

Remaja Rosdakarya. 1990.

Wanandi, Jusuf. *Menyibak Tabir Orde Baru (memoir Politik Indonesia 1965-*

1998), Jakarta: Jakarta: Kompas, 2014.

Wardaya, Baskara. *Menguak Misteri Kekuasaan Soeharto*, Yogyakarta: Galang

Press. 2008.

Winanto, Budi. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta:Medpress, 2002

Yatim,Badri. *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Yulianto, Dwi Pratomo . *Militer dan Kekuasaan*. Tanpa Penerbit.

Zada, Khamami.,*Menangkap Potret Gerakan Islam di Indonesia*,

Jakarta:Tashwirul Afkar, 2002.